



CImplementasi COREMAP

Di Kabupaten Wakatobi:

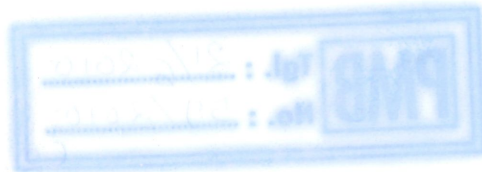
**Partisipasi Masyarakat dan
Manfaat Sosial Ekonomi**

CImplementasi COREMAP

**Di Kabupaten Wakatobi:
Partisipasi Masyarakat dan
Manfaat Sosial Ekonomi**

Oleh:

**DENY HIDAYATI
FITRANITA
RUSLI CAHYADI**



COREMAP-LIPI

**Coral Reef Rehabilitation and Management Program
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(COREMAP II – LIPI)
Jakarta, 2009**



© 2010 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Pusat Penelitian Kependudukan bekerja sama dengan COREMAP*

Katalog dalam Terbitan

Implementasi COREMAP di Kabupaten Wakatobi: Partisipasi Masyarakat dan Manfaat Sosial Ekonomi/Deny Hidayati, Fitranita, Rusli Cahyadi – Jakarta: 2010.

xvi + 115 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-8717-44-1

1. Sumber Daya Laut – Kondisi Sosial Ekonomi

333.911



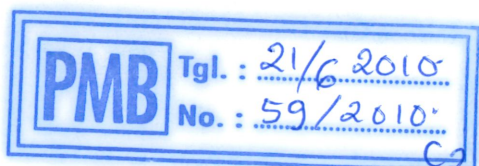
*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI

Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan, 12710

Telp.: (021) 5221687, 5251542 Psw. 720

Telp.: (021) 5207205, 5221687

E-mail: ppk-lipi@rad.net.id



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II di beberapa lokasi di Indonesia Bagian Barat telah berjalan kurang lebih lima tahun. Selama kurun waktu pelaksanaan COREMAP tersebut, berbagai program dan kegiatan berkaitan dengan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan terumbu karang, pengelolaan berbasis masyarakat dan pengawasan telah dilakukan.

Untuk melihat keberhasilan COREMAP dari aspek sosial – ekonomi, dilakukan kajian BME sosial - ekonomi. Kajian ini dilakukan pada awal, tengah dan akhir program. Kajian pada awal dan tengah program telah dilakukan pada tahun 2006 dan 2008. Kajian sosial – ekonomi tahun 2006 (T0) bertujuan untuk melihat kondisi sosial – ekonomi masyarakat sebelum program dan kegiatan COREMAP dilakukan. Sedangkan kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2008 (T1) bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan, untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2009 dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP dari aspek sosial ekonomi yang dikaitkan dengan tujuan program COREMAP yaitu tercapainya pelestarian terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini merupakan hasil dari kajian BME sosial-ekonomi (T2) yang dilakukan pada tahun 2009 di lokasi-lokasi COREMAP di Indonesia Bagian Timur. BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku ini melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan yang terdiri atas masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di lokasi di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, CRITC Kabupaten Wakatobi dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Jakarta, Desember 2009
Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Susetiono

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini merupakan hasil Benefit Monitoring and Evaluation ke dua (BME II) perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Wakatobi, khususnya Desa Mola Selatan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha di Kecamatan Wangi-Wangi. Ketiga lokasi ini telah menjadi lokasi Coremap sejak tahun 2005.

BME II yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif ini bertujuan untuk memahami pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan terumbu karang dan penggunaan bahan/alat yang merusak, pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Coremap. Selain itu, monitoring juga dilakukan untuk mengetahui manfaat sosial ekonomi kegiatan Coremap bagi masyarakat di ketiga lokasi tersebut.

Pelaksanaan Coremap di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha telah mengalami perkembangan, namun belum optimal. Gambaran ini diketahui dari masih terbatasnya kepedulian masyarakat terhadap terumbu karang, terbatasnya partisipasi dalam kegiatan Coremap dan minimnya kontribusi Coremap dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan terumbu karang dan penggunaan bahan/alat yang ilegal

Pengetahuan masyarakat tentang terumbu karang bervariasi menurut fungsi ekologi dan manfaat sosial ekonomi. Hasil kajian menginformasikan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui

fungsi ekologi terumbu karang, terutama fungsinya sebagai rumah ikan, tempat tumbuh dan berkembang biak, serta melindungi keragaman hayati laut. Pengetahuan juga bervariasi menurut lokasi dengan persentase pengetahuan responden tertinggi terdapat di Desa Waha dan terendah di Desa Mola Selatan. Keadaan ini dapat dipahami karena Desa Waha langsung berbatasan dengan laut lepas yang paling merasakan resiko yang tinggi dari proses alam yang terjadi di laut dan kegiatan sosialisasi dari Coremap, terutama MD. Sedangkan pengetahuan responden tentang manfaat sosial ekonomi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pengetahuan tentang fungsi terumbu karang.

Sikap masyarakat menurut hasil BME II cukup menggembirakan, diindikasikan dari sebagian besar responden tidak setuju pengambilan terumbu karang dan penggunaan bahan/alat yang merusak. Tetapi sikap ini kurang konsisten karena hasil BME juga mengindikasikan sebagian masyarakat juga mengambil karang, baik dalam kondisi hidup atau mati. Pengambilan karang terutama terjadi di Desa Mola Selatan.

Penggunaan bahan dan alat yang merusak karang mengalami penurunan antara sebelum adanya Coremap dan dalam satu tahun terakhir. Penggunaan bom dalam menangkap ikan sudah hampir tidak ada lagi di semua lokasi terutama setelah adanya Coremap. Kondisi serupa juga terjadi pada penggunaan bus sianida di semua lokasi, terutama Desa Mola Selatan dan tuba, khususnya di Desa Waha, turun secara signifikan pada periode tersebut.

Pengetahuan dan partisipasi dalam kegiatan Coremap

Keberhasilan penurunan kegiatan ilegal ini, sayangnya belum diikuti oleh partisipasi masyarakat, yang masih sangat minim, dalam kegiatan Coremap. Kondisi ini berkaitan erat dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan Coremap di

ke tiga lokasi, dikarenakan terbatasnya sosialisasi oleh pengelola Coremap, seperti LPSTK, LKM, MD (kecuali di Desa Waha), dan CF, dan minimnya paket kegiatan ekonomi UEP/MPA serta pembangunan sarana fisik desa.

Terbatasnya partisipasi masyarakat berimplikasi pada minimnya manfaat Coremap bagi masyarakat. Sebagian besar anggota masyarakat mengatakan bahwa manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan Coremap hampir sama, yaitu masih minim. Pondok informasi yang sudah dibangun masih kurang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, karena sumber informasi atau bahan-bahan yang tersedia masih sangat terbatas. Pembangunan jalan setapak di Wandoka dan jembatan perintis di Nelayan Bakti, Mola Selatan manfaatnya juga masih terbatas pada warga di sekitarnya saja. Pemberian sarana ibadah dirasakan cukup bermanfaat, namun hanya sebagian masyarakat di Kelurahan Wandoka dan Mola Selatan.

Kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat

Hasil BME II menginformasikan bahwa Coremap di Kabupaten Wakatobi, khususnya Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha belum berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat. Keadaan ini berkaitan erat dengan masih terbatasnya anggota masyarakat, khususnya anggota pokmas dan kelompok jender yang mendapat dana bergulir untuk usaha ekonomi. Usaha ekonomi yang dikembangkan oleh pokmas dan kelompok jender sebagian kecil telah berkontribusi dalam pendapatan rumah tangganya, tetapi kebanyakan belum menghasilkan karena kecilnya dana, usaha merugi, gagal dan alasan tertentu.

Pendapatan masyarakat umumnya bersumber dari pendapatan dari kegiatan non Coremap. Pendapatan rumah tangga dari kenelayan lebih rendah daripada pendapatan secara umum. Pendapatan nelayan bervariasi menurut musim dengan

pendapatan tertinggi tertinggi diperoleh pada musim tenang, yaitu sebesar Rp. 1,1 juta per bulan, dan sebaliknya, pendapatan terendah pada musim gelombang kuat, sebesar Rp. 602 ribu per bulan. Lebih dari separoh rumah tangga nelayan mengelompok pada rumah tangga berpendapatan terendah yaitu kurang dari Rp. 500 ribu per bulan. Rendahnya pendapatan berkaitan erat dengan hasil tangkap yang belum mengalami peningkatan, kecuali pendapatan nelayan di Desa Waha.

Sedangkan pendapatan rumah tangga anggota pokmas atau kelompok jender penerima dana UEP lebih besar, yaitu Rp. 1,5 juta per bulan, lebih tinggi 13 persen dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak tergabung dalam pokmas. Namun kondisi ini belum mengindikasikan keberhasilan Coremap, karena anggota pokmas kebanyakan adalah anggota masyarakat yang telah mempunyai usaha dan tokoh-tokoh masyarakat dengan kondisi ekonomi yang relatif lebih baik daripada kondisi rumah tangga non pokmas.

Gambaran di atas mengindikasikan masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Coremap dan minimnya manfaat sosial dan ekonomi kegiatan Coremap bagi masyarakat. Namun, kegiatan Coremap mengalami perkembangan di semua lokasi, karena itu pengalaman ini dapat dijadikan pembelajaran untuk memperbaiki kegiatan Coremap ke depan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR DIAGRAM	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Metodologi	4
1.4. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Coremap	8
1.4.1. <i>Public Awareness</i>	8
1.4.2. Pengawasan Terumbu Karang	13
1.4.3. Pengelolaan Berbasis Masyarakat	15
1.4.4. Pengembangan DPL	17
1.5. Pembabakan Penulisan	20
BAB II PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT	21
2.1. Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Penduduk Mengenai Terumbu Karang Dan Upaya- Upaya Penyelamatan	22
2.2. Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Penduduk Mengenai Alat Tangkap Yang Merusak	32

BAB III	PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MANFAAT	
	SOSIAL EKONOMI COREMAP	41
3.1.	Pengetahuan Dan Partisipasi	41
3.2.	Manfaat Sosial	60
3.3.	Manfaat Ekonomi	65
3.3.1.	Pendapatan Rumah Tangga	66
3.3.2.	Pendapatan Per Kapita	73
3.3.3.	Pendapatan Kenelayanan	75
3.3.4.	Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas	87
BAB IV	PENUTUP	95
4.1.	Kesimpulan	95
4.2.	Rekomendasi	109
DAFTAR PUSTAKA		114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pengetahuan Penduduk tentang Fungsi Terumbu Karang di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	23
Tabel 2.2.	Pengetahuan Penduduk tentang Kondisi dan Pentingnya Perbaikan Terumbu Karang di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	25
Tabel 2.3.	Pengambilan Karang Sebelum Coremap dan dalam Setahun Terakhir di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Tahun 2009	30
Tabel 2.4.	Pemanfaatan Karang di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	31
Tabel 2.5.	Pengetahuan Penduduk tentang Alat Tangkap yang Merusak di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009 (Responden menjawab ya)	33
Tabel 2.6	Pengetahuan Responden tentang Peraturan Pemerintah yang Melarang Perusakan Terumbu Karang, Bom, Sianida, dan Pukat di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Tahun 2009 (Responden yang Menjawab ya)	34

Tabel 2.7.	Sikap Responden terhadap Larangan/Peraturan Pemerintah di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	37
Tabel 3.1.	Persentase Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Coremap di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	44
Tabel 3.2.	Persentase Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan LPSTK di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	46
Tabel 3.3.	Persentase Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan LKM di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	51
Tabel 3.4.	Persentase Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kelompok Masyarakat di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	53
Tabel 3.5.	Persentase Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pelatihan di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	55
Tabel 3.6.	Persentase Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Motivator Desa (MD) dan Fasilitator Masyarakat (CF) di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	59

Tabel 3.7.	Statistik pendapatan rata-rata rumah tangga di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	67
Tabel 3.8.	Persentase Kontribusi Sumber Pendapatan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	68
Tabel 3.9.	Distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Tahun 2009 (Persentase)	73
Tabel 3.10.	Distribusi Rumah Tangga Miskin di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009 (Persentase)	75
Tabel 3.11.	Statistik pendapatan kenelayanan per bulan per musim di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	77
Tabel. 3.12.	Distribusi pendapatan kenelayanan per bulan per musim di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009 (Persentase)	79
Tabel. 3.13.	Distribusi pendapatan kenelayanan per bulan menurut desa di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009 (Persentase)	81

Tabel. 3.14. Distribusi persentase perubahan pendapatan dari kenelayaan dan hasil tangkap sebelum dan sesudah pelaksanaan Coremap di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	82
Tabel 3.15. Distribusi persentase rumah tangga tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan hasil tangkap di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	85
Tabel 3.16. Statistik pendapatan rumah tangga anggota pokmas dan non pokmas di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	88
Tabel. 3.17. Distribusi persentase rumah tangga anggota pokmas penerima UEP dan non pokmas bukan penerima UEP di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	89

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1.	Pendapat terhadap Pengambilan Karang Hidup	27
Diagram 2.2.	Pendapat Responden tentang Pengambilan Karang Mati di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	28
Diagram 2.3.	Persentase Responden yang Menyatakan Alat Tangkap Merusak di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009	32
Diagram 2.4.	Persentase Penggunaan Bom Sebelum Coremap dan Satu Tahun Terakhir di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha	38
Diagram 2.5.	Presentase Penggunaan Sianida Sebelum Coremap dan Satu Tahun Terakhir di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha	39
Diagram 3.1.	Persentase Responden yang Mengetahui Keberadaan Coremap di Desa Mola Selatan, Kelurahan, Wandoka dan Desa Waha, Tahun 2009	42

Diagram 3.2. Persentase Responden yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Sarpras di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Tahun 2009	62
Diagram 3.3. Persentase Responden yang Menyatakan Pembangunan Sarpras Bermanfaat di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Tahun 2009	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Wakatobi merupakan lokasi Coremap Fase II di wilayah timur Indonesia. Kegiatan Coremap menyebar di 7 kecamatan mencakup 40 desa yang menyebar di Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia dan Pulau Binongko. Pengelolaan terumbu karang di kabupaten ini sangat penting, karena Wakatobi terletak di segitiga karang dunia. Kawasan karang di kabupaten ini menyebar di seluruh wilayah dengan luas mencapai 90.000 hektar. Keanekaragaman karang disini sangat tinggi, terdiri dari 750 jenis karang dari 850 spesies karang dunia. Selain itu, Wakatobi memiliki atol terpanjang di dunia yaitu Atol Kaledupa (48 km) (Bappeda Kabupaten Wakatobi, 2006; Nontji, 2001).

Kondisi terumbu karang di Wakatobi mengalami fluktuasi. Hasil survei REA di 33 stasiun tahun 2003 menginformasikan kondisi terumbu karang dalam dalam keadaan baik. Tetapi, hasil survei CRITC LIPI di 52 stasiun RRI tahun 2006 menggambarkan kondisi terumbu karang telah berubah menjadi kategori sedang. Tutupan karang hidup rata-rata mencapai 31 persen yang terdapat di Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa dan Tomia. Tutupan karang bervariasi antar pulau dengan persentase terendah (27 persen) di Pulau Wangi-Wangi dan tertinggi (44 persen) di Pulau Tomia. Kondisi terumbu karang kemudian mengalami perbaikan diindikasikan dari hasil survei ekologi CRITC LIPI tahun 2007 yang mengemukakan tutupan karang mencapai 46,9 persen atau naik sekitar 15,9 persen dari persentase hasil survei tahun 2006. Tutupan karang tertinggi (75,9 persen) terdapat di kawasan

karang Tomia dan sebaliknya tutupan karang terendah (23,1 persen) ditemukan di kawasan karang Kapota.

Terumbu karang di kawasan Wakatobi mendapat tekanan yang cukup besar, terutama dari penggunaan bahan dan alat yang merusak dan penambangan batu karang dan pasir (Hidayati dan Rachmawati, 2002 dan Hidayati dkk, 2007). Sumber daya laut ini telah dimanfaatkan secara intensif dalam kurun waktu yang cukup lama, baik oleh masyarakat setempat maupun nelayan dari luar daerah. Kegiatan perikanan tangkap di sekitar kawasan menggunakan bahan peledak (bom) dan beracun (bius/potas) sebelum diimplementasikannya Coremap, sehingga menyebabkan degradasi ekosistem tersebut.

Coremap merupakan program pemerintah untuk menyelamatkan terumbu karang dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan Coremap pada tahap awal difokuskan pada sosialisasi pentingnya pelestarian terumbu karang dan pembentukan lembaga pengelola Coremap di lokasi-lokasi Coremap. Coremap kemudian melakukan berbagai kegiatan, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, dan pengawasan terumbu karang oleh kelompok masyarakat. Semua kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan terumbu karang dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wakatobi.

Hasil *Benefit Monitoring and Evaluation* tahap pertama atau BME I yang dilaksanakan tahun 2008 menginformasikan bahwa pelaksanaan Coremap telah mengalami perkembangan, tetapi masih menghadapi berbagai kendala. Pelaksanaan Coremap di tingkat kabupaten mengalami keterlambatan pada awalnya dan kurang efektif dalam pengelolaan program karena kurangnya koordinasi dengan *stakeholders*, kendala administrasi dan perubahan jumlah lokasi karena pemekaran desa/kelurahan. Sedangkan komponen-komponen Coremap, seperti *Public Awareness* atau PA, *Community Based Management* atau CBM,

Monitoring, Controlling and Surveillance atau MCS dan *Coral Reefs Information and Training Center* atau CRITC, lebih terfokus pada kegiatan di tingkat kabupaten. Pembimbingan dan pemantauan pelaksanaan program di tingkat lokasi sangat minim, karena tidak tersedianya dana *sharing* untuk monitoring (Hidayati dkk, 2008).

Pelaksanaan di tingkat lokasi menurut hasil BME I juga masih sangat terbatas dan bervariasi antar desa. Keadaan ini berkaitan erat dengan masih terbatasnya kegiatan Coremap di lokasi melalui *village grant* dan *seed fund* serta terbatasnya peran organisasi pengelola di tingkat desa dan masyarakat. Dampak kegiatan Coremap terhadap masyarakat karena itu juga masih terbatas. Keadaan ini berimplikasi pada minimnya dampak kegiatan Coremap untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sebagian besar masyarakat di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha dan belum dirasakan oleh semua masyarakat di Desa Mola Selatan.

1.2. TUJUAN

Kegiatan *Benefit monitoring and evaluation* tahap kedua atau BME II bertujuan untuk mengkaji perkembangan pelaksanaan Coremap, khususnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya laut, partisipasi dalam kegiatan Coremap dan manfaat sosial ekonomi Coremap bagi masyarakat.

Tujuan BME II secara spesifik terdiri dari:

- Mengkaji pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan terumbu karang dan penggunaan bahan/alat yang merusak sumber daya laut ini
- Menggambarkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Coremap di tingkat lokasi dan faktor-faktor yang berpengaruh

- Menganalisis manfaat sosial dan ekonomi kegiatan Coremap bagi masyarakat.

Kegiatan monitoring dari aspek sosial ekonomi (BME) ini sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Coremap di lokasi dan memahami permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di lokasi Coremap. Dengan demikian, Coremap diharapkan dapat mencapai tujuan pada akhir program, sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam dokumen.

1.3. METODOLOGI

Lokasi Kajian

Kajian BME II ini dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, khususnya Pulau Wangi-Wangi, Desa Mola Selatan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha di Kecamatan Wangi-Wangi. Lokasi monitoring di ke tiga desa/kelurahan dilakukan secara *purposive*, yaitu lokasi Coremap yang pelaksanaannya telah berlangsung sejak tahun 2005. Ke tiga lokasi ini merupakan lokasi *baseline* studi yang dilakukan bulan November 2006 dan BME I bulan Mei 2008.

Ke tiga desa/kelurahan telah mengalami pemekaran. Pada waktu BME I dilaksanakan Desa Mola Selatan mekar menjadi Desa Mola Selatan dan Desa Nelayan Bakti; Kelurahan Wandoka mekar menjadi Kelurahan Wandoka dan Wandoka Utara; dan Desa Waha mekar menjadi Desa Waha, Korowe-onowa dan Wapia-pia. Pada waktu BME II dilakukan beberapa desa/kelurahan juga dalam proses pemekaran. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan Coremap secara utuh, maka BME II masih menggunakan lokasi desa induk (sebelum pemekaran), yaitu Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada BME II ini menggunakan pendekatan yang sama dengan pengumpulan data pada *baseline* tahun 2006 dan BME I tahun 2008, yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif direalisasikan melalui survei, sedangkan kualitatif melalui kegiatan wawancara terbuka, diskusi kelompok terfokus atau *focus group discussions* atau FGD, dan observasi lapangan.

• Survei

Survei dilaksanakan pada responden yang sama dengan responden pada *baseline* dan BME I dengan beberapa responden pengganti dan tambahan. Jumlah responden untuk BME II sebanyak 173 rumah tangga, 23 responden lebih banyak dari jumlah responden pada *baseline* studi. Sekitar 95 persen responden pada *baseline* studi dapat didata kembali, sedangkan sisanya harus digantikan dengan responden lain, karena pindah ke tempat lain atau meninggal dunia. Responden pengganti adalah tetangga (sebelah rumah) yang kondisi sosial ekonominya hampir sama dengan responden yang digantikan. Sedangkan penambahan responden dimaksudkan untuk mengikutsertakan rumah tangga yang terlibat secara langsung dalam kegiatan kelompok masyarakat (pokmas) Coremap. Responden BME II sesuai dengan responden pada *baseline* dan BME I, bertempat tinggal di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha (yaitu wilayah administrasi sebelum pemekaran desa/kelurahan).

Penentuan responden BME II, yang sesuai dengan kajian *baseline* dan BME I, merupakan prasyarat untuk mengetahui perubahan/perkembangan kondisi sosial ekonomi, terutama pendapatan rumah tangga responden sebelum dan setelah adanya kegiatan Coremap. Gambaran mengenai perubahan kondisi sosial

ekonomi ini penting untuk mengetahui keberhasilan program, khususnya peningkatan pendapatan. Gambaran ini dapat mengindikasikan capaian program, sesuai dengan indikator keberhasilan Coremap, yaitu: pendapatan penduduk meningkat dua persen per tahun. Selain itu, pengetahuan dan kepedulian responden terhadap pelestarian terumbu karang dan partisipasi dalam kegiatan Coremap dapat diikuti perkembangannya dari responden yang relatif sama.

Instrumen yang digunakan dalam survei adalah kuesioner yang didesain dalam dua bagian, yaitu: kuesioner untuk rumah tangga dan individu/perorangan. Kuesioner rumah tangga bertujuan untuk mengumpulkan data rumah tangga, seperti ekonomi rumah tangga (pendapatan dari perikanan tangkap dan budidaya, dan non perikanan, termasuk pertanian, perdagangan, buruh/karyawan, industri rumah tangga, dan lainnya) dan partisipasi anggota rumah tangga dalam kegiatan Coremap serta manfaat Coremap bagi rumah tangga yang bersangkutan. Sedangkan kuesioner individu bertujuan untuk mengumpulkan data dari individu atau perorangan, seperti pengetahuan, sikap dan perilaku dalam pemanfaatan terumbu karang dan penggunaan bahan/alat yang merusak, pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Coremap.

Survei dilaksanakan oleh pewawancara lokal dari Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Sebagian besar pewawancara adalah pewawancara yang melaksanakan survei pada *baseline* dan BME I, karena itu mereka mempunyai pemahaman dan pengalaman dalam pelaksanaan survei. Para pewawancara dipilih secara purposif, berdasarkan pengalaman melakukan pendataan dengan Kantor Statistik, guru, tokoh pemuda dan aparat pemerintah desa/kelurahan. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara mendapat pelatihan dari peneliti LIPI mengenai maksud dan tujuan penelitian, isi dan cara mengisi kuesioner serta tatacara melaksanakan survei.

• Data Kualitatif

Pengumpulan data kualitatif berbeda dengan pengumpulan data kuantitatif (survei) yang menggunakan tenaga lokal. Data kualitatif dikumpulkan langsung oleh peneliti PPK-LIPI menggunakan metode wawancara terbuka, FGD dan observasi lapangan.

Peneliti mewawancarai informan-informan kunci yang dipilih secara *purposive*, termasuk pengurus Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Motivator Desa (MD), dan *Community Facilitator* (CF), Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan beberapa anggotanya, Pokmaswas, kelompok jender, nelayan, pimpinan formal dan informal di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Wawancara dilaksanakan dengan panduan pedoman wawancara yang berisi poin-poin penting mengenai pelaksanaan Coremap, termasuk kegiatan LPSTK, LKM, Pokmas, kelompok jender dan Pokmaswas; usaha ekonomi produktif (UEP) atau matapencaharian alternatif (MPA); pengawasan terumbu karang, dan dampak Coremap terhadap pelestarian terumbu karang dan peningkatan pendapatan/ kesejahteraan masyarakat.

Data kualitatif juga dikumpulkan melalui Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion atau FGD) dengan anggota pokmas, kelompok jender dan pokmaswas serta nelayan. Hasil FGD menambah pemahaman peneliti mengenai pelaksanaan Coremap dan dampaknya terhadap pelestarian terumbu karang dan kesejahteraan masyarakat, permasalahan dan kendala yang dialami serta alternatif penyelesaian masalah di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha.

Analisis Data

Analisis data disesuaikan dengan pendekatan kajian yaitu kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data

kuantitatif hasil survei berupa diskripsi, tabel frekuensi dan diagram (lingkaran dan batang). Sedangkan analisis data kualitatif difokuskan pada analisis situasi dengan pendekatan kontekstual yang menggambarkan pengetahuan, perilaku masyarakat dalam pemanfaatan terumbu karang, pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Coremap dan manfaat Coremap bagi masyarakat. Analisis ini penting untuk mendukung analisis kuantitatif, sehingga mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan terpadu mengenai perkembangan kegiatan Coremap dan dampaknya terhadap kelestarian terumbu karang dan kesejahteraan masyarakat.

1.4. GAMBARAN PELAKSANAAN KEGIATAN COREMAP

Coremap telah diimplementasikan sejak tahun 2005 di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, termasuk peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pelestarian terumbu karang atau *public awareness* (PA), pengawasan dan pengendalian atau *monitoring, controlling and surveillance* (MCS), pengelolaan berbasis masyarakat atau *community based management* (CBM), dan pengembangan daerah perlindungan laut (DPL).

1.4.1. Public Awareness

Public awareness (PA) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan terumbu karang. Program ini menjadi penting karena kondisi terumbu karang di kabupaten ini sebelum adanya Coremap telah mengalami degradasi. Kondisi ini selain disebabkan oleh faktor alami juga disebabkan oleh perilaku manusia yang merusak karang. Perilaku negatif masyarakat

tersebut berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan kepedulian terhadap sumberdaya laut ini.

Kegiatan *public awareness* telah dilakukan sejak awal pelaksanaan Coremap bulan Mei 2005 dan masih berlangsung sampai Oktober 2009. Pada awal tahun 2006 ketika *baseline study* dilakukan, cukup banyak kegiatan PA yang dilakukan, antara lain: pembuatan materi buku, dokumen visual-shooting, sosialisasi ke setiap kecamatan Coremap, even-even lokal, seperti lomba karya tulis, training guru dan pengembangan produk mulok. Pada tahun 2007, kegiatan PA dilakukan oleh pihak ketiga yang mendapat kontrak dari Coremap. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengadaan perlengkapan (seperti papan informasi dan mesin cetak), desiminasi informasi PA, pelatihan komunikasi dan penyuluhan, pelatihan jurnalis lingkungan, pembuatan materi (dalam bentuk poster-poster, baju, dan topi), sosialisasi di lokasi, workshop guru SMP dengan peserta sebanyak 45 guru (dua peserta per sekolah), dan even lokal (Kontes Innovator Muda atau KIM). Papan informasi didistribusikan ke setiap pondok informasi, sedangkan mesin cetak di Kantor Coremap Kabupaten Wakatobi. Desiminasi Coremap juga dilakukan melalui iklan di radio & TV lokal (lewat TV kabel) pada bulan September/Oktober 2007. Pelatihan komunikasi dan penyuluhan dilaksanakan secara swakelola dengan peserta adalah *Senior Training Officer* (Seto), *Community Facilitator* (CF), Motivator Desa (MD), dan Birokrat Eselon III. Materi pelatihan disampaikan oleh staf Bappeda dan JICA. Pelatihan jurnalis lingkungan melibatkan 35 peserta terdiri dari wartawan lokal (radio, Wakatobi Pos), wartawan dari Provinsi Sultra (seperti perwakilan dari Media Sultra, Kendari Pos, dan Kendari Ekspres), dan siswa SMA.

Kegiatan PA tahun 2008 meliputi KIM, pembuatan materi, workshop/training guru, munas/pameran, duta karang, kompetisi jurnalis, lomba foto bawah laut, even lokal berupa cerdas cermat.

Kegiatan duta karang juga dilakukan pada bulan Juli tahun 2009, kegiatan ini melahirkan duta karang yang mengemban tugas untuk mewakili Kabupaten Wakatobi pada pemilihan duta karang tingkat nasional.

Kegiatan penyadaran terhadap masyarakat tidak terbatas dilakukan melalui kegiatan-kegiatan formal yang diadakan oleh Coremap tetapi juga dilakukan secara informal melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Salah satu bentuk kegiatan sosialisasi Coremap secara informal adalah melalui kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh MD di lokasi Coremap, khususnya Desa Waha, dengan memberikan penerangan kepada masyarakat pada waktu dilakukannya sholat jumat di mesjid-mesjid. Kegiatan penyadaran tersebut juga dilakukan MD pada saat berkumpul di pinggir pantai secara tidak sengaja dengan beberapa orang anggota masyarakat.

Penyadaran masyarakat juga telah dilakukan di tiga desa yang menjadi lokasi penelitian yaitu Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Kegiatan ini terutama dilaksanakan pada awal kegiatan Coremap di ketiga desa tersebut oleh pengurus Coremap Kabupaten dan Pusat. Cara yang paling sering digunakan adalah metode ceramah yang berisi pengarahan tentang terumbu karang, permasalahan dan pentingnya pelestarian sumber daya laut. Disamping itu penyadaran juga dilakukan melalui rapat-rapat dalam kelompok kecil yang terdiri dari peserta wakil masyarakat, pengurus Coremap dan pihak Dinas DKP Kabupaten Wakatobi.

Desa Mola Selatan (sebelum pemekaran) merupakan lokasi pertama Coremap di Kabupaten Wakatobi. Kegiatan penyadaran masyarakat sudah dimulai sejak awal kegiatan tahun 2005, meskipun tidak intensif. Penyadaran masyarakat setidaknya dilakukan sebanyak 3 kali oleh pengelola Coremap dari DKP Jakarta, Dinas DKP Kabupaten Wakatobi dan LSM dari Makassar. Cara yang digunakan berbeda-beda. DKP pusat memanfaatkan

media yaitu video dan layar tancap untuk menyampaikan pesan pengelolaan terumbu karang di desa ini. Pada awalnya masyarakat menganggap kegiatan Coremap akan membatasi kegiatan mereka dalam penangkapan ikan, namun setelah dilakukan penyuluhan sebagian masyarakat mulai menyadari pentingnya keberadaan Coremap, terutama setelah kondisi terumbu karang di Kawasan Karang Kapota memang sudah mengalami kerusakan.

Kegiatan penyadaran masyarakat sudah jarang sekali dilakukan di Desa Mola Selatan. Peran pengurus Lembaga Pengelola Sumber Daya terumbu Karang (LPSTK), MD, CF dan pengurus Coremap yang lain dalam penyadaran masyarakat juga sangat terbatas. Hal ini berkaitan dengan kurang aktifnya pengurus dan keterbatasan materi penyadaran yang dapat digunakan pengurus di desa ini. Seorang MD bahkan tidak mengetahui tentang terumbu karang, seperti informasi yang sangat mendasar apakah terumbu karang termasuk tumbuhan atau hewan. Bagaimana pengurus dapat memberikan sosialisasi jika pengurus sendiri juga tidak tau apa yang akan disosialisasikan.

Pondok informasi di Desa Mola Selatan, sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi, tetapi pondok ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Observasi terhadap pondok informasi pada saat dilakukannya kajian bulan Oktober 2009 menemukan bahwa pondok informasi selalu dalam keadaan tertutup dan tidak dimanfaatkan sama sekali. Bahkan ketika ditanyakan kepada masyarakat banyak yang tidak mengetahui apa kegunaan dari pondok informasi tersebut.

Gambaran yang serupa juga terjadi di Kelurahan Wandoka. Kegiatan penyadaran dilakukan oleh Seto dan CF sebelum terbentuknya LPSTK dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), namun frekuensinya juga sangat terbatas. Setelah kelembagaan masyarakat ini terbentuk, pengurus LPSTK dan LKM, MD, CF dan pengurus lainnya melakukan penyadaran masyarakat di 6

lingkungan yang terdapat di kelurahan ini. Seorang CF bahkan jarang sekali mengunjungi pokmas yang menjadi binaannya, hanya 3 kali sejak diangkat menjadi CF, hampir satu tahun. Pengetahuan CF dan MD tentang terumbu karang juga masih sangat terbatas, seperti di Desa Mola Selatan, seorang MD yang diwawancarai juga tidak mengetahui apakah terumbu karang termasuk tumbuhan atau hewan dan kurang jelas akan tugas dan kewajibannya. Dengan pengetahuan yang sangat minim, pengurus Coremap tersebut mengalami kendala untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang di kelurahan ini.

Sama halnya dengan Desa Mola Selatan, keberadaan pondok informasi di Kelurahan Wandoka juga kurang dimanfaatkan dan kurang menunjang kegiatan penyadaran masyarakat. Ketika kajian dilakukan pondok selalu dalam keadaan tertutup dengan kondisi kotor. Poster-poster yang dipasang di pondok sudah banyak yang hilang karena tertiuap angin. Pondok baru dibuka dan dibersihkan ketika tim kajian (Oktober 2009) datang ke pondok tersebut.

Dari ke tiga desa yang menjadi lokasi penelitian, Desa Waha merupakan desa yang paling aktif dalam memberikan penyadaran terhadap masyarakatnya tentang pentingnya pelestarian terumbu karang. Dalam hal ini, peran MD sangat besar. Penyuluhan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan formal yang dilakukan Coremap, tetapi juga dilakukan secara informal seperti pada waktu mengobrol dengan beberapa orang anggota masyarakat. Penyuluhan juga dilakukan di tempat peribadatan seperti di mesjid pada saat dilakukannya sholat jumat berjamaah. Keberadaan pondok informasi di desa ini juga memegang peranan penting dalam memberikan penyadaran. Kondisi pondok informasi yang baik, di tata dengan sangat meriah serta lokasinya yang strategis telah menarik warga untuk datang ke pondok tersebut. Di pondok informasi ini, warga dapat

memperoleh berbagai informasi tentang pentingnya keberadaan dan pelestarian terumbu karang bagi kehidupan mereka dan berbagai kegiatan Coremap dan tempat berkumpul dan menonton televisi pemuda-pemuda di desa ini.

1.4.2. Pengawasan Terumbu Karang

Komponen pemantauan, pengawasan dan pengendalian atau *Monitoring, Controlling and Surveillance* (MCS) merupakan komponen yang juga sangat diperlukan dalam pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Komponen MCS dalam pelaksanaannya terfokus pada peraturan daerah dan operasional kegiatan pengawasan berupa kegiatan patroli dan pengembangan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di lokasi Coremap. Komponen ini memfasilitasi kegiatan pengawasan di tingkat kabupaten dan tingkat lokasi Coremap.

MCS di tingkat kabupaten dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan Dinas DKP Bagian Pengawasan dan Pengendalian, Taman Nasional, TNI AL/Polres dan WWF. Tim ini melakukan patroli sebulan sekali. Di samping itu, patroli juga dilakukan sendiri-sendiri oleh Dinas DKP, WWF dan Taman Nasional. Dinas DKP untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian telah melatih dua stafnya hingga mempunyai sertifikat PPNS. Kedua staf tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan jika terjadi pelanggaran di laut.

Komponen MCS Kabupaten Wakatobi tahun 2007 melakukan kegiatan berupa pelatihan dan pengadaan peralatan. Kegiatan pelatihan difokuskan pada dua topik, yaitu sertifikasi perdagangan ikan karang yang diikuti oleh pengusaha ikan dari 40 desa sasaran program dan LSM Yayasan Sulawesi Raya, dan *destructive fishing*, yaitu pendataan di masing-masing desa Coremap oleh LSM Yayasan Sulawesi Raya. Komponen MCS untuk peningkatan kapasitas peralatan melakukan pengadaan

speed boat dengan mesin berkekuatan 80 PK yang ditempatkan di ibukota kabupaten. Komponen MCS juga mengadakan peralatan seperti GPS, jaket renang, masker, snorkel, kompas, peta Wakatobi. Peralatan MCS ini didistribusikan ke 40 desa/kelurahan lokasi Coremap.

Selain di tingkat kabupaten, komponen MCS juga mengembangkan kapasitas MCS di tingkat lokasi. Kegiatan pengawasan di desa/kelurahan dilakukan oleh kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) menggunakan sistem pengawasan masyarakat (siswasmas). Komponen MCS pada 2007 melakukan apel siaga siswasmas. Apel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi (tupoksi) siswasmas. Komponen ini juga memfasilitasi pelatihan ketua pokmaswas tentang pokmaswas, peran siskamling dan peran TNI dalam hukum dan kedaulatan di laut oleh TNI-AL. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Dinas DKP Provinsi Sultra.

Pokmaswas yang melakukan patroli tidak mempunyai kewenangan untuk menangkap pelanggar. Pokmaswas harus melapor ke Dinas DKP, dan Dinas akan berkoordinasi dengan tim terpadu, termasuk Taman Nasional, TNI AL/Polres untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Mekanisme ini sudah diimplementasikan, bahkan tim terpadu pernah dua kali menangkap nelayan yang sedang membius ikan dan pembius tersebut setelah di proses hukum di Bau-Bau telah diganjar hukuman selama 2 bulan penjara.

Komponen MCS kabupaten melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengawasan di lokasi Coremap, namun kegiatannya masih terbatas. Pemantauan dilakukan pada lokasi yang dekat kantor Coremap, seperti Desa Waha, Mola Utara dan Mola Selatan. Hal ini berkaitan erat dengan tidak turunnya biaya operasional Coremap, termasuk untuk komponen MCS, karena tidak adanya dana pendamping.

1.4.3. Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Komponen *Community-Based Management* (CBM) di tingkat kabupaten bertugas memfasilitasi dan membimbing kelompok masyarakat dalam mengelola terumbu karang, baik yang berkaitan dengan pengawasan dan penyelamatan sumber daya laut ini maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Mata Pencapaian Alternatif (MPA). Komponen CBM atau Pengelolaan Berbasis Masyarakat menjadi dasar pengelolaan terumbu karang di tingkat lokasi karena masyarakat merupakan pengguna utama sumber daya laut.

Kegiatan Komponen CBM mengalami perkembangan antara tahun 2006 dan 2008 kegiatan ini juga masih berlangsung tahun 2009. Komponen CBM mulai melaksanakan kegiatannya tahun 2006, namun masih terbatas pada *requitment* Seto, CF, dan MD. Kegiatan Komponen CBM mulai intensif tahun 2007 dengan melakukan pelatihan dan studi banding ke Makassar. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Seto dan CF tentang kefasilitatoran dan *tim work*, dan kapasitas MD tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta teknis pelaksanaan di lapangan. Komponen CBM juga melakukan pelatihan untuk Seto, CF, MD dan ketua Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di 40 lokasi tentang keuangan mikro dan matapencapaian alternatif. Pelatihan ini umumnya difasilitasi oleh pengelola Coremap tingkat pusat, demikian juga narasumber pelatihan berasal dari Jakarta. Sedangkan studi banding ke Makassar bertujuan untuk mempelajari pengelolaan rumput laut yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah.

Kegiatan pelatihan pemantauan kesehatan terumbu karang merupakan salah satu bagian dari kegiatan komponen CBM. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas lembaga pengawas terumbu karang (pokmaswas) dalam memantau daerah konservasi di masing-masing desa. Pelatihan

ini telah dilakukan sebanyak empat kali, terakhir diadakan tahun 2009 yang dihadiri oleh 40 peserta dari desa-desa yang menjadi lokasi Coremap II di Kabupaten Wakatobi. Pelatihan ini dilakukan di dua lokasi yaitu di Pulau Wangi-Wangi dan Pulau Tomia.

Komponen CBM idealnya juga memfasilitasi kegiatan yang bersumber dari dana *village grant* (pengembangan sarana dan prasarana desa/kelurahan) dan *seed fund* (dana bergulir). Komponen ini bekerjasama dengan unsur PMU mengadakan pertemuan dengan LPSTK semua lokasi untuk menjelaskan pelaksanaan *village grant* dan *seed fund* di lokasi. Kegiatan *village grant* sudah dilaksanakan di 16 lokasi. Kegiatan di lokasi Coremap yang baru (24 desa/kelurahan) masih terfokus pada penggalian potensi melalui PRA dan pembuatan RPTK. Kegiatan dari *seed fund* pada saat dilakukan kajian (Oktober 2009) juga sedang berjalan termasuk di Desa Mola Selatan yang pada saat dilakukan kajian pada Mei 2008 masih tertunda karena adanya permasalahan dengan ketua LKM. Komponen CBM berupaya untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat yang tergabung dalam Usaha Ekonomi Produktif (pokmas UEP) dengan pelatihan pengelolaan mata pencaharian alternatif dan keterampilan usaha, seperti kerajinan.

Kegiatan CBM yang berkaitan dengan penyelamatan terumbu karang, khususnya Daerah Perlindungan Laut (DPL) juga sedang berlangsung. Kegiatan penyusunan dan penetapan DPL telah dilakukan, kegiatan pelatihan untuk percobaan penetapan DPL ini juga pernah dilaksanakan tahun 2006. Lokasi DPL adalah di kawasan terumbu karang atau mangrove, disesuaikan dengan kebutuhan lokasi yang dapat dipantau oleh masyarakat. DPL dapat dikembangkan di satu lokasi dan/atau beberapa lokasi bergabung membuat satu DPL. Sebagai contoh Desa Mola Selatan dan Mola Utara tidak membuat DPL karena wilayahnya sangat terbatas, kedua desa ini mendukung DPL yang terletak di

Desa Kolo dan Numana. Beberapa desa/kelurahan sudah mempunyai DPL yang disahkan dalam peraturan desa (Perdes), seperti DPL Desa Waha (meskipun tanda batas DPL telah hilang karena ketidaksetujuan sebagian masyarakat). Pada bulan Juli-Agustus 2008 telah dilakukan kegiatan penyusunan dan penetapan DPL yang dilakukan secara swakelola oleh PMU Coremap II Kabupaten Wakatobi dengan membentuk tim survei dengan ketua tim teknis oleh koordinator MCS Coremap II kabupaten Wakatobi. Dari kegiatan ini telah ditetapkan DPL di 40 desa untuk 8 Kecamatan yang menjadi lokasi Coremap II dengan menggunakan GPS

Komponen CBM tidak mempunyai dana operasional, karena itu staff komponen ini tidak dapat melakukan monitoring di semua lokasi, terutama lokasi-lokasi yang letaknya jauh dari Kantor Coremap di Wanci. Pihak CBM hanya mendapat laporan kemajuan kegiatan CBM dari Seto, CF dan MD pada waktu mereka mengambil gaji di kantor Coremap. Laporan tersebut tentu saja belum optimal untuk mengetahui secara jelas kegiatan dan permasalahan yang dihadapi CBM di lokasi.

1.4.4. Pengembangan DPL

Coremap mempunyai tujuan untuk melindungi, merehabilitasi dan memanfaatkan terumbu karang di Indonesia secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terumbu karang merupakan habitat bagi banyak spesies laut dan juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari erosi. Secara ekonomi, terumbu karang merupakan sumber perikanan yang produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam rangka melestarikan terumbu karang tersebut maka Coremap mempunyai kegiatan pengelolaan terumbu karang secara terpadu yang disebut sebagai *Marine Protected Area* atau Daerah Perlindungan Laut (DPL).

DPL merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi perlindungan sumber daya hayati dan non hayati laut, karena itu pengelolaannya memerlukan ketentuan khusus. Daerah ini diperuntukkan sebagai tempat bertelur dan berkembang biaknya ikan dan biota laut, karena itu zona inti tidak boleh dimanfaatkan, namun nelayan masih diizinkan memancing di bagian pinggir, tapi tidak boleh merusak karang, seperti pengeboman, pembiusan dan penambangan batu karang. Penentuan lokasi DPL idealnya adalah berdasarkan kesepakatan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wilayah ini. Kesepakatan masyarakat diperlukan agar tidak menimbulkan konflik di tingkat masyarakat.

Sejak tahun 2006 – 2008 Program Coremap Kabupaten Wakatobi telah mencanangkan DPL sebanyak 35 dari 40 desa lokasi program. Data ini diperoleh dari kegiatan penyusunan dan penetapan daerah perlindungan laut untuk tahun anggaran 2008 yang dilaksanakan secara swakelola oleh PMU Coremap II Kabupaten Wakatobi. Kegiatan ini dilakukan bulan Juli – Agustus 2008 40 desa yang menjadi lokasi Coremap II di Kabupaten Wakatobi.

Dari ke tiga desa yang menjadi lokasi BME, hanya Desa Mola Selatan yang belum mempunyai DPL. Sementara itu, pembentukan DPL di Kelurahan Wandoka yang menjadi lokasi penelitian telah dilakukan sejak April 2008. Lokasi DPL berada dekat dengan permukiman penduduk, sekitar 300 meter dari pantai di depan pondok informasi yang terletak di tengah perkampungan/lingkungan Wandoka. DPL yang berukuran $250 \times 300 \text{ m}^2$ ini terdiri dari zona inti seluas $50 \times 100 \text{ m}^2$, zona penyangga $100 \times 100 \text{ m}^2$, dan zona pemanfaatan $100 \times 100 \text{ m}^2$. Pelaksanaan DPL di kelurahan ini pada awalnya mengalami kendala terutama, dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak menyetujui lokasi DPL. Lokasi DPL pada mulanya disepakati pengurus Coremap dan masyarakat di perbatasan antara

Wandoka dan Sambu. Di perbatasan ini tidak ada permukiman, sehingga tidak akan mengganggu lalu lintas penduduk. Namun pada kenyataannya terjadi sengketa tapal batas sebagai akibat adanya pemekaran wilayah, sehingga lokasi DPL dipindahkan di tengah kampung. Keadaan ini menimbulkan pro dan kontra. Semua ketua lingkungan mulanya menyetujui lokasi yang baru ini, namun karena penolakan sebagian besar masyarakat, maka sebagian ketua lingkungan juga menarik dukungannya. Lokasi DPL saat ini belum permanen, jika masalah tapal batas sudah dapat diselesaikan maka lokasi DPL akan dipindahkan di daerah perbatasan tersebut.

DPL di Desa Waha juga ditetapkan bulan April 2008 sesaat sebelum kedatangan tim evaluasi World Bank. DPL ini berukuran $350 \times 350 \text{ m}^2$, terletak di Desa Koroe (desa ini sebelum pemekaran merupakan bagian dari Desa Waha) sekitar 500 meter dari pantai. Penempatan DPL di lokasi ini kurang mendapat persetujuan masyarakat, karena tempat ibu-ibu mencari ikan dan letaknya dekat permukiman penduduk. Wilayah DPL batasnya ditandai dengan pelampung, namun tanda batas ini hilang sehari setelah kepulangan tim World Bank. Penolakan masyarakat ini berkaitan erat dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai DPL. Mereka mengira keberadaan DPL menyebabkan masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan apapun, termasuk memancing, seperti di lokasi konservasi Tomia. Masalah ini sebetulnya dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi secara intensif tentang pentingnya keberadaan DPL dan dampaknya terhadap pelestarian sumber daya laut dan peningkatan pendapatan penduduk. Menurut data yang diperoleh dari survei penyusunan dan penentuan lokasi DPL oleh PMU, luas DPL yang terdapat di Desa Waha adalah 18,78 ha.

Setelah terjadi pemekaran desa, diharapkan pada akhirnya masing-masing desa yang merupakan hasil pemekaran

mempunyai DPLnya masing-masing. Desa Waha Induk telah menetapkan lokasi DPL yang terletak di pinggir pantai di depan pondok informasi. Lokasi DPL terletak memanjang sepanjang pantai dengan panjang 350 meter. Pada awalnya terjadi banyak protes dari penduduk mengenai lokasi DPL tersebut, karena terlalu dekat dengan lokasi pemukiman. Namun karena kondisi terumbu karangnya di lokasi ini yang paling bagus, maka DPL ini akhirnya dapat diterima oleh masyarakat.

1.5. PEMBABAKAN PENULISAN

Laporan BME II Coremap di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang kajian, tujuan dan metodologi yang digunakan serta gambaran pelaksanaan kegiatan Coremap di ke tiga lokasi kajian. Bab ke dua menginformasikan pengetahuan masyarakat tentang terumbu karang, sikap dan perilaku dalam pemanfaatan sumber daya laut dan penggunaan bahan/alat tangkap yang merusak. Bab ke tiga berfokus pada pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Coremap, dan manfaat Coremap bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Bab terakhir merupakan penutup yang merangkum perilaku dan partisipasi masyarakat serta manfaat Coremap bagi masyarakat dan kelestarian terumbu karang serta rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan Coremap ke depan.

BAB II

PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT

Bagian ini menggambarkan variasi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan terumbu karang dan alat/bahan tangkap yang merusak karang di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Analisa dibagi dalam dua bagian berdasarkan dua aspek pokok yaitu terumbu karang dan alat tangkap. Pada bagian pertama analisa dimulai dari aspek pengetahuan yang paling mendasar dari fungsi terumbu karang, kondisinya hingga sikap dan perilaku penduduk dalam upaya penyelamatan dan perbaikan terumbu karang. Bagian kedua menganalisa pengetahuan penduduk akan alat tangkap yang merusak yang dilanjutkan dengan sikap mereka dalam melihat keberadaan berbagai peraturan pemerintah tentang penggunaan alat-alat tangkap yang merusak. Pada bagian ini akan dibahas pula perilaku penduduk berkaitan dengan penggunaan alat-alat tangkap yang merusak.

Menurut Ajzen's (2002) tentang *theory of planned behavior*, perilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu: 1) *behavioral beliefs*; 2) *normative beliefs*; dan 3) *control beliefs*. Interaksi dan pertarungan ketiga pengetahuan (*beliefs*) inilah yang menentukan sikap (*intention*) yang akan diambil oleh seseorang yang pada akhirnya akan menentukan perilaku yang diwujudkannya. Secara sederhana *behavioral beliefs* dan *control beliefs* adalah pengetahuan yang menjadi sistem norma di dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan baik dan buruk. Sementara *normative beliefs* adalah situasi-situasi/kondisi-kondisi sesaat, bisa berupa

tekanan sosial atau kepercayaan/pengetahuan yang sifatnya personal. Dalam banyak kasus peran dari *normative beliefs* ini tidak bisa dianggap sepele.

2.1. PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU PENDUDUK MENGENAI TERUMBU KARANG DAN UPAYA-UPAYA PENYELAMATAN

• *Pengetahuan*

Pengetahuan responden tentang berbagai fungsi terumbu karang bisa dikatakan variatif, meski pada umumnya sudah cukup bagus (lihat tabel 2.1). Dari berbagai fungsi terumbu karang, fungsi paling menonjol yang diketahui oleh penduduk adalah sebagai rumah ikan (tempat berkembang biaknya ikan, yaitu tempat hidup, bertelur dan mencari makan). Fungsi-fungsi lain secara berurutan (dari persentase terbesar hingga persentase kecil) adalah melindungi keragaman hayati laut, melindungi pantai dari ombak dan badai, sumber bahan baku (obat, rumah dan hiasan), sumber pendapatan dan tempat wisata. Persentase penduduk yang mengetahui berbagai fungsi terumbu karang semakin menurun tampaknya seiring dengan semakin jauhnya fungsi tersebut dari kehidupan mereka. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase pengetahuan yang berkaitan dengan bahan baku obat dan tempat kegiatan wisata.

Pengecualian terlihat pada fungsi pendapatan yang mungkin didapatkan penduduk dari terumbu karang. Relatif rendahnya persentase penduduk yang melihat terumbu karang sebagai sumber pendapatan terkait dengan dua hal. Pertama, selama ini terumbu karang memang telah menjadi sumber pendapatan warga (terutama di Mola Selatan), namun pengawasan terhadap aktivitas penambangan karang yang semakin intensif, telah menyebabkan kegiatan ini berada di wilayah “tersembunyi”. Kampanye penyelamatan terumbu karang yang dilakukan oleh

berbagai pihak telah menyebabkan penduduk menjauhkan kegiatan penambangan karang dengan pendapatan mereka pada tataran pengetahuan. Kedua, terumbu karang sebagai sumber pendapatan dimaknai secara berbeda oleh warga di satu pihak dan orang luar (serta pemerintah) di pihak lain. Orang luar dan pemerintah mengartikan terumbu karang sebagai sumber pendapatan secara tidak langsung. Ini artinya bukan terumbu karangnya (fisik) secara langsung yang harus dimanfaatkan, tetapi fungsinya (manfaat) berupa habitat ikan maupun keindahannya (untuk pariwisata, misalnya). Sementara penduduk setempat mengartikannya sebagai pendapatan secara langsung dengan mengekstraksi terumbu karangnya. Tampaknya masih jauh bagi mereka untuk menghubungkan tingkat kesejahteraan mereka dengan karang secara tidak langsung.

Tabel 2.1.

Pengetahuan Penduduk tentang Fungsi Terumbu Karang di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Fungsi terumbu karang	Desa						Total	
	Mola Selatan		Wandoka		Waha			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Rumah ikan (tempat berkembang biak)	76	95,0	54	98,2	37	97,4	167	96,5
Melindungi keragaman	76	95,0	50	90,9	37	97,4	163	94,2
Melindungi pantai dari ombak dan badai	65	81,3	49	89,1	37	97,4	151	87,3
Bahan baku (obat,rumah,hiasan)	69	86,3	43	78,2	10	26,3	122	70,5
Sumber pendapatan	76	95,0	7	12,7	29	76,3	112	64,7
Tempat wisata	48	60,0	7	12,7	28	73,7	83	48,0

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang*, COREMAP-LIPI (2009)

Responden yang menghubungkan terumbu karang dengan kegiatan wisata persentasenya rendah, kurang dari 50 persen. Keadaan ini cukup menarik karena Wakatobi adalah daerah tujuan wisata pantai di Indonesia yang mengandalkan keindahan terumbu karangnya untuk menarik kedatangan wisatawan. Kabupaten Wakatobi dengan slogannya "Surga Nyata di bawah Laut" ternyata hanya dikenal oleh para wisatawan dan birokrat kabupaten. Pada tingkat masyarakat, warga masih sulit menghubungkan antara terumbu karang dengan pariwisata dan selanjutnya dengan mata pencaharian alternatif. Meski kesenjangan antara apa yang dirancang oleh pemerintah dan pengetahuan penduduk ini secara umum berlaku di berbagai tempat yang hendak dijadikan sebagai daerah tujuan wisata, namun melihat potensi besar yang dimiliki oleh Wakatobi dan dua daerah lain (Bunaken dan Raja Ampat, dalam konteks segitiga karang dunia) maka permasalahan ini harus segera dicarikan solusinya. Berkaitan dengan lemahnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat ini, Elliot, dkk (2001: 298-300) telah mencoba menguraikan berbagai permasalahan tersebut dalam konteks Wakatobi.

Wilkinson (2004 dikutip dalam Haapkyla, dkk, 2007) memperkirakan bahwa lebih dari 20 persen karang dunia telah rusak, sekitar 24 persen berada dalam kondisi terancam akibat tekanan aktivitas manusia dan lebih dari 26 persen lainnya berada dalam ancaman kerusakan jangka panjang. Dampak kegiatan manusia baik yang bersifat langsung, seperti eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut, maupun yang tidak langsung, seperti meningkatnya sedimentasi yang semuanya bermuara ke laut, merupakan penyebab utama kerusakan terumbu karang. Data global yang ditunjukkan oleh Wilkinson tersebut pada tataran lokal (Wakatobi) hingga derajat tertentu memperlihatkan kesesuaian dengan data yang dikumpulkan dalam survei ini.

Sebagai salah satu dari sedikit situs karang dunia yang masih bagus, kondisi terumbu karang di Wakatobi masih cukup baik. Kondisi ini ternyata juga diamati oleh sebagian besar responden (lihat tabel 2.2.). Hampir 70 persen responden menyatakan bahwa terumbu karang di sekitar mereka masih baik. Persentase responden yang menyatakan baik, bervariasi menurut desa, paling rendah di Desa Mola Selatan (kurang dari 50 persen) dan paling tinggi di Kelurahan Wandoka (80 persen), sedangkan di Desa Waha kondisi karangnya berada diantara ke dua desa/kelurahan lainnya (63 persen).

Variasi pengetahuan ini bisa dijelaskan dari beberapa faktor. Diantara ketiga desa tersebut, Mola Selatan adalah desa dimana penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Dengan profesi sebagai nelayan, mereka memiliki interaksi yang lebih intensif dengan laut (karang) sehingga pengetahuan mereka tentang karang dan laut bersifat aktual. Sedangkan dua desa lainnya pekerjaan penduduknya didominasi oleh pekerja sektor pertanian dan jasa.

Tabel 2.2.

Pengetahuan Penduduk tentang Kondisi dan Pentingnya Perbaikan Terumbu Karang di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Uraian	Desa						Total	
	Mola Selatan		Wandoka		Waha			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Kondisi terumbu karang								
Baik	39	48,8	44	80,0	24	63,2	107	61,8
Kurang baik	22	27,5	2	3,6	10	26,3	34	19,7
Rusak	4	5,0	1	1,8	1	2,6	6	3,5
Sangat rusak	1	1,3	0	0	0	0	1	0,6
Tidak tahu	14	17,5	8	14,5	3	7,9	25	14,5
Total	80	100,0	55	100,0	38	100,0	173	100,0
Perlu perbaikan								
Ya	75	93,8	50	90,9	29	76,3	154	89,0
Tidak tahu	5	6,3	5	9,1	9	23,7	19	11,0
Total	80	100,0	55	100,0	30	100,0	173	100,0

Sumber: Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)

Persentase yang sangat berbeda antara Desa Mola Selatan dan Kelurahan Wandoka perlu dikritisi lebih lanjut. Apa yang dikemukakan oleh responden Desa Mola Selatan sangat mungkin bisa dipercaya dibandingkan dengan pendapat penduduk Wandoka. Penduduk Mola Selatan yang sebagian besar adalah nelayan sehari-harinya berada di laut dan melihat langsung kondisi terumbu karang secara kontinyu. Sementara penduduk Wandoka tidak punya akses untuk melihat kondisi karang secara terus menerus. Pengetahuan mereka bisa jadi merupakan pengetahuan tidak langsung, yang didapatkan dari berbagai sumber sekunder. Selain itu, perbedaan ini juga berkaitan dengan pengalaman penggunaan bahan ilegal yang merusak terumbu karang yang dilakukan nelayan Mola Selatan lebih intensif dari nelayan di ke dua desa/kelurahan lainnya, terutama sebelum adanya kegiatan Coremap.

Sifat kritis ini diperlukan terutama jika dikaitkan dengan sikap penduduk Wandoka berkaitan dengan perlu tidaknya perbaikan terhadap kondisi terumbu karang. Persentase responden yang menyatakan hal tersebut hampir sama dengan penduduk Mola Selatan (91 persen berbanding 94 persen). Besarnya jumlah penduduk yang menyatakan bahwa terumbu karang yang ada perlu diperbaiki menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi terumbu karang lebih buruk daripada yang mereka nyatakan sebelumnya.

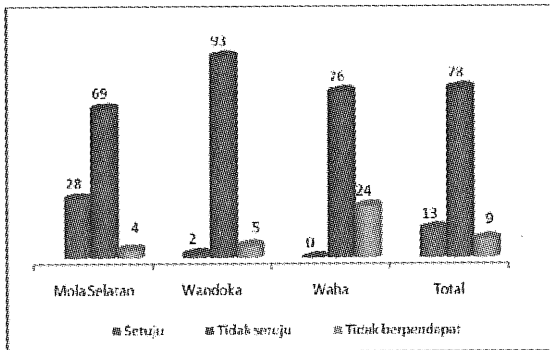
Pengetahuan responden tentang peraturan pemerintah yang melarang pengambilan karang masih kurang memadai, kurang dari 62 persen responden yang mengetahui keberadaan aturan tersebut. Pengetahuan responden ini terutama berasal dari responden Desa Waha dimana semua responden mengetahui keberadaan aturan tersebut. Padahal sebagian besar penduduk Waha bukanlah nelayan. Sebaliknya, persentase terendah berasal dari responden Desa Mola Selatan, yang diikuti oleh Wandoka.

Secara umum pengetahuan penduduk di ketiga lokasi terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan cukup baik dan kelompok yang memiliki pengetahuan yang kurang. Responden di Desa Waha umumnya memiliki pengetahuan yang lebih baik, sebaliknya penduduk di Mola Selatan pengetahuannya paling rendah, sedangkan Wandoka berada diantara kedua desa tersebut.

• Sikap

Variabel sikap penduduk berkaitan dengan terumbu karang didekati melalui pendapat responden tentang pengambilan terumbu karang hidup dan mati, dan melalui pendapat tentang larangan/peraturan pengambilan karang.

Diagram 2.1.
Pendapat terhadap Pengambilan
Karang Hidup



Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Diagram 2.1 dan Diagram 2.2 menginformasikan

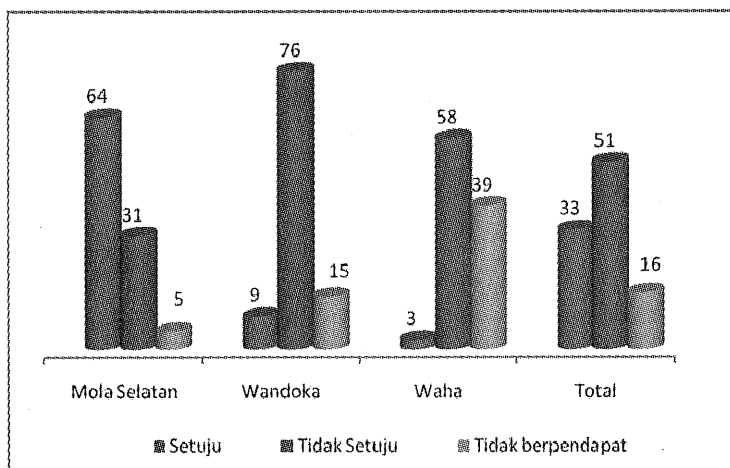
bahwa hanya responden di Desa Mola Selatan yang menunjukkan sikap yang terbelah dalam pengambilan terumbu karang, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Sementara di dua lokasi lainnya responden

umumnya tidak setuju dengan pengambilan karang. Tetapi, responden di Desa Mola Selatan menunjukkan sikap yang agak

berbeda, mereka umumnya setuju dengan aturan yang melarang pengambilan batu karang. Sebagian besar penduduk (87 persen) mendukung larangan ini, tetapi mereka juga setuju penduduk mengambil karang.

Kekurang konsistenan sikap warga Mola Selatan terkait erat dengan pekerjaan dan kehidupan mereka sehari-hari. Pengambilan karang diperlukan untuk tujuan komersil dan/atau kebutuhan sendiri. Sebagian penduduk Mola Selatan mengambil karang sebagai sumber nafkah, sementara sebagian lagi untuk membangun fondasi rumah. Selama tidak ada alternatif lain untuk membangun rumah, maka selama penduduk bertambah selama itu pula kegiatan pengambilan karang akan dilakukan.

Diagram 2.2.
Pendapat Responden tentang Pengambilan Karang Mati
di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha,
Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009



Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

- *Perilaku*

Pada tataran perilaku hasil BME mengindikasikan kecenderungan positif dan negatif sekaligus. Kecenderungan positif diketahui dari berkurangnya jumlah penduduk yang mengambil karang mati. Jika sebelum kegiatan Coremap terdapat hampir 24 persen responden yang mengambil karang mati, maka dalam setahun terakhir jumlahnya sedikit berkurang menjadi sekitar 17 persen. Namun disisi lain, gejala pengambilan karang hidup justru meningkat cukup besar, dari 3,5 persen menjadi hampir 13 persen (tabel 2.3.). Kondisi yang cukup drastis terjadi di Wandoka dimana selama satu tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi responden yang menyatakan mengambil karang baik hidup maupun mati.

Tabel 2.3. menginformasikan dua kecenderungan pada satu tahun terakhir yaitu; 1) menurunnya pengambilan batu karang (hidup maupun mati) untuk keperluan komersial (dijual); dan 2) meningkatnya pengambilan karang untuk penggunaan sendiri. Jika diamati secara umum, gejala ini berkaitan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan fisik di Wanci secara umum.

Di ketiga lokasi penelitian juga ditemui maraknya pembangunan perumahan dengan fondasi masih menggunakan karang. Maraknya penggunaan karang ini juga terkait dengan tumbuhnya semacam kesepahaman di kalangan warga, terutama di Mola Selatan, bahwa pengambilan karang mati untuk keperluan sendiri diperbolehkan. Meningkatnya pembangunan fisik terutama rumah-rumah permanen menyebabkan kebutuhan akan batu baik sebagai fondasi maupun untuk keperluan lain semakin meningkat. Saat ini penduduk memilih membangun rumah permanen (batu), dikarenakan mahalnya harga kayu dan gaya hidup. Pembangunan rumah kayu juga mengalami kendala karena sulit untuk mendapatkan bahan bakunya.

Tabel 2.3.
Pengambilan Karang Sebelum Coremap dan dalam Setahun Terakhir di Desa
Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan
Desa Waha, Tahun 2009

Pengambilan karang	Desa						Total	
	Mola Selatan		Wandoka		Waha			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sebelum adanya coremap								
Karang hidup	5	6,3	1	1,8	0	0,0	6	3,5
Karang mati	28	35,0	4	7,3	9	23,7	41	23,7
Karang hidup+karang mati	16	20,0	4	7,3	0	0,0	20	11,6
Tidak pernah	31	38,8	46	83,6	29	76,3	106	61,3
Total	80	100,0	55	100,0	38	100,0	173	100,0
Setahun terakhir								
Karang hidup								
Ya	21	26,2	0	0,0	1	2,6	22	12,7
Tidak	59	73,8	55	100,0	37	97,4	151	87,3
Total	80	100,0	55	100,0	38	100,0	173	100,0
Karang mati								
Ya	28	35,0	0	0,0	1	2,6	29	16,8
Tidak	52	65,0	55	100,0	37	97,4	144	83,2
Total	80	100,0	55	100,0	38	100,0	173	100,0

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI*
(2009)

Gejala tidak kompatibelnya modernisasi dengan upaya penyelamatan lingkungan tampaknya akan tetap menjadi persoalan. Hal ini terutama dikalangan masyarakat di ketiga lokasi dimana pilihan penduduk sangat terbatas.

Tabel 2.4.
Pemanfaatan Karang di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa
Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Pemanfaatan karang	Desa						Total	
	Mola Selatan		Wandoka		Waha			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Karang hidup								
Dijual	4	19,0	-	-	0	0,0	4	18,2
Digunakan sendiri	12	57,1	-	-	1	100,0	13	59,1
Dijual dan digunakan sendiri	4	19,0	-	-	0	0,0	4	18,2
Kepentingan umum	1	4,8	-	-	0	0,0	1	4,5
Total	21	100,0	-	-	1	100,0	22	100,0
Karang mati								
Dijual	2	7,1	-	-	0	0,0	2	6,9
Digunakan sendiri	18	64,3	-	-	1	100,0	19	65,5
Dijual dan digunakan sendiri	7	25,0	-	-	0	0,0	7	24,1
Kepentingan umum	1	3,6	-	-	0	0,0	1	3,4
Total	28	100,0	-	-	1	100,0	29	100,0

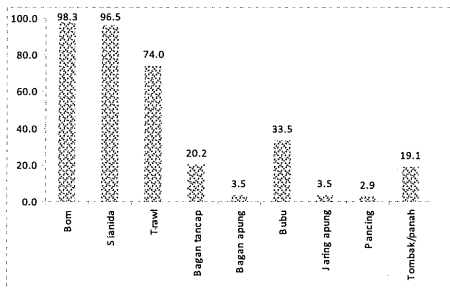
Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

2.2. PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU PENDUDUK MENGENAI ALAT TANGKAP YANG MERUSAK

• *Pengetahuan*

Pengetahuan, sikap dan perilaku penduduk mengenai alat tangkap pada umumnya ditentukan oleh faktor apakah alat tersebut mereka gunakan atau tidak. Nelayan Wakatobi pada umumnya adalah nelayan dengan wilayah operasi di sekitar daerah mereka, meski sebagian, terutama nelayan Mola, ada juga yang beroperasi hingga ke perairan internasional (Hidayati dan Rachmawati, 2002 dan Stacey, 2007). Sebagai nelayan tradisional, alat tangkap yang digunakan juga terbatas jenisnya. Dari semua alat tangkap yang disebutkan di tabel 2.5. tidak semuanya mereka gunakan. Hal inilah yang mempengaruhi pengetahuan mereka berkaitan dengan daya rusak alat tersebut terhadap terumbu karang.

Diagram 2.3.
Persentase Responden yang Menyatakan
Alat Tangkap Merusak di Desa Mola
Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa
Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009



Sumber: *Data Primer BME Sosial
Ekonomi Terumbu Karang,
COREMAP-LIPI (2009)*

Diagram 2.3.
menggambarkan bahwa bom menurut responden adalah alat tangkap yang paling merusak karang. Tetapi tabel 2.5. mengungkapkan beberapa responden di Mola Selatan menyatakan bahwa penggunaan bom tidak merusak. Meski angkanya sangat kecil, akan tetapi fakta ini menunjukkan bahwa ada persoalan dengan penggunaan bom di wilayah tersebut.

Selain bom, responden juga menyatakan sianida/racun, *trawl*, bubu, tombak/panah dan bagan tancap sebagai alat tangkap yang merusak. *Trawl* dan bagan tancap meskipun dianggap sebagai alat tangkap yang merusak, tetapi hal ini tidak berpengaruh karena nelayan Wakatobi umumnya tidak menggunakan alat tangkap tersebut.

Tabel 2.5.

Pengetahuan Penduduk tentang Alat Tangkap yang Merusak di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009 (Responden menjawab ya)

Jenis alat tangkap	Desa						Total	
	Mola Selatan		Wandoka		Waha			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Bom	79	98,8	53	96,4	38	100,0	170	98,2
Bagan Tancap	4	5,0	14	25,5	17	44,7	35	20,2
Bagan apung	1	1,3	4	7,3	1	2,6	6	3,5
Sianida	80	100,0	49	89,1	38	100,0	167	96,5
Bubu	13	16,3	12	21,8	33	86,8	58	33,5
Trawl	69	86,3	40	72,7	19	50,0	128	74,0
Jaring apung	2	2,5	2	3,6	2	5,3	6	3,5
Pancing	2	2,5	0	0,0	3	7,9	5	2,9
Tombak	2	2,5	3	5,5	28	73,7	33	19,1
Total (N)	80		55		38		173	

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang*, COREMAP-LIPI (2009)

Berbeda dengan responden di Desa Mola Selatan, responden di Wandoka dan Waha memberikan jawaban yang bervariasi. Sebagian responden masih mengindikasikan adanya kesalahan persepsi tentang alat-alat tangkap yang tidak ramah terhadap terumbu karang. Sebagian responden masih belum bisa menentukan dengan baik apakah, misalnya, *trawl*, bagan tancap, sianida dan bubu merupakan alat yang merusak atau tidak merusak.

Pengetahuan penduduk tentang alat-alat tangkap yang merusak terumbu karang tampaknya menarik jika dianalisa berkaitan dengan pengetahuan mereka tentang keberadaan peraturan pemerintah yang melarang pengambilan/perusakan terumbu karang. Pemerintah juga melarang penggunaan bom, sianida dan pukat (*trawl*).

Tabel 2.6. menggambarkan bahwa pengetahuan responden tentang peraturan pemerintah yang melarang pengambilan karang dan alat-alat yang illegal bervariasi menurut alat dan lokasi. Persentase pengetahuan responden tertinggi adalah penggunaan bom. Semua responden di Desa Waha mengetahui tentang peraturan pemerintah ini, sedangkan responden dari Kelurahan Wandoka dan Desa Mola pengetahuannya hampir sama, yaitu lebih dari dua per tiga responden.

Tabel 2.6

Pengetahuan Responden tentang Peraturan Pemerintah yang Melarang Perusakan Terumbu Karang, Bom, Sianida, dan Pukat di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Tahun 2009 (Responden yang Menjawab ya)

Uraian	Desa						Total	
	Mola Selatan		Wandoka		Waha			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pengambilan karang	37	46,3	32	58,2	38	100,0	107	61,8
Penggunaan bom	56	70,0	40	72,7	38	100,0	134	77,5
Penggunaan sianida	43	53,8	33	60,0	34	89,5	110	63,6
Penggunaan trawl	26	32,5	25	45,5	8	21,2	59	34,1
Total (N)	80		55		38		173	

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Sebaliknya, persentase pengetahuan responden yang paling rendah adalah penggunaan *trawl*, hanya sekitar sepertiga dari total responden dengan persentase tertinggi berasal dari responden di Kelurahan Wandoka dan terendah responden di Desa Mola Selatan. Rendahnya pengetahuan ini dapat dipahami, karena alat tangkap ini tidak digunakan nelayan di ketiga lokasi tersebut.

Sedangkan pengetahuan responden tentang pengambilan karang sangat bervariasi antar lokasi. Responden di Desa Waha semuanya mengetahui pelarangan ini, sebaliknya responden di Desa Mola yang tahu sangat sedikit, kurang dari separoh dari responden.

Variasi pengetahuan responden juga terjadi pada peraturan pemerintah dalam penggunaan sianida. Hampir 90 persen responden di Desa Waha mengetahui larangan penggunaan bahan yang ilegal ini. Persentase tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengetahuan responden di kedua lokasi lain, hanya 53 persen di Desa Mola Selatan dan 60 persen di Kelurahan Wandoka.

Tingginya pengetahuan responden di Desa Waha tentang peraturan pemerintah berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan Coremap di desa tersebut. Keberadaan pondok informasi yang kerap dijadikan sebagai tempat berkumpul warga merupakan salah satu sarana penyebaran informasi yang efektif. Motivator Desa (MD) di Desa ini sangat aktif menyebarluaskan informasi berkaitan dengan pelestarian terumbu karang. Selain itu pondok informasi tersebut juga kerap dijadikan sebagai tempat berkumpul pejabat pemerintah kabupaten hingga ke pucuk pimpinan Bupati.

- *Sikap*

Secara teoritis, sikap seseorang terhadap sesuatu sangat ditentukan oleh serangkaian pengetahuan yang dimiliki serta faktor-faktor lain (lihat bagian awal tulisan ini).

Tabel 2.7 menginformasikan variasi sikap responden terhadap peraturan pemerintah tentang larangan pengambilan karang, penggunaan bom, sianida dan *trawl*. Pengetahuan responden relatif berimbang antar lokasi pada pengambilan karang dan penggunaan bom, sebagian besar responden atau lebih dari 80 persen, setuju dengan larangan tersebut. Sedangkan sikap terhadap larangan penggunaan sianida dan *trawl* relatif berbeda antar lokasi.

Sebagian kecil responden tidak setuju terhadap pelarangan pengambilan karang, penggunaan bom, sianida dan *trawl*. Kondisi ini tidak mengagetkan, karena sebagian kecil responden menyatakan tidak tahu tentang keberadaan aturan pemerintah yang melarang pengambilan karang dan penggunaan alat-alat yang merusak karang tersebut.

Jika diamati secara detail, gejala penolakan ini terjadi di ketiga lokasi. Gejala ini perlu diwaspadai dan dijadikan sebagai tantangan ke depan. Upaya untuk merubah sikap penduduk yang negatif semacam ini tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab kegiatan Coremap semata akan tetapi tanggungjawab pemerintah secara lebih luas.

Tabel 2.7.
Sikap Responden terhadap Larangan/Peraturan Pemerintah di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Uraian	Desa						Total	
	Mola Selatan		Wandoka		Waha			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pengambilan karang								
Setuju	33	89,2	29	90,6	33	86,8	95	88,8
Tidak Setuju	1	2,7	3	9,4	0	0,0	4	3,7
Tidak berpendapat	3	8,1	0	0	5	13,2	8	7,4
Total	37	100,0	32	100,0	38	100,0	107	100,0
Penggunaan bom								
Setuju	47	83,9	33	82,5	34	89,5	114	85,1
Tidak Setuju	8	14,3	7	17,5	1	2,6	16	11,9
Tidak berpendapat	1	1,8	0	0	3	7,9	4	3,0
Total	56	100,0	40	100,0	38	100,0	134	100,0
Penggunaan sianida								
Setuju	36	83,7	24	72,7	31	91,2	91	82,7
Tidak Setuju	7	16,3	9	27,3	0	0,0	16	14,5
Tidak berpendapat	0	0,0	0	0	3	8,8	3	2,7
Total	43	100,0	33	100,0	34	100,0	110	100,0
Penggunaan trawl								
Setuju	19	70,4	21	84,0	8	100,0	48	80,0
Tidak Setuju	7	25,9	4	16,0	0	0,0	11	18,3
Tidak berpendapat	1	3,7	0	0	0	0,0	1	1,7
Total	27	100,0	25	100,0	8	100,0	60	100,0

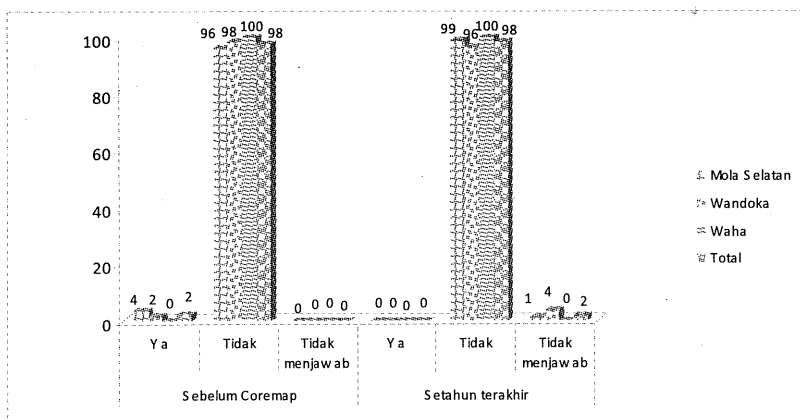
Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

• *Perilaku*

Sikap responden ternyata berbeda dengan perilaku. Diagram 2.4 mengungkapkan penurunan secara signifikan penggunaan bom

sebelum dan sesudah kegiatan Coremap atau satu tahun terakhir. Semua responden dalam setahun terakhir menjawab tidak lagi menggunakan bom. Kecenderungan yang sama juga diperlihatkan pada penggunaan *trawl*. Hal ini dikarenakan nelayan Wakatobi tidak mengenal dan tidak menggunakan *trawl* tersebut.

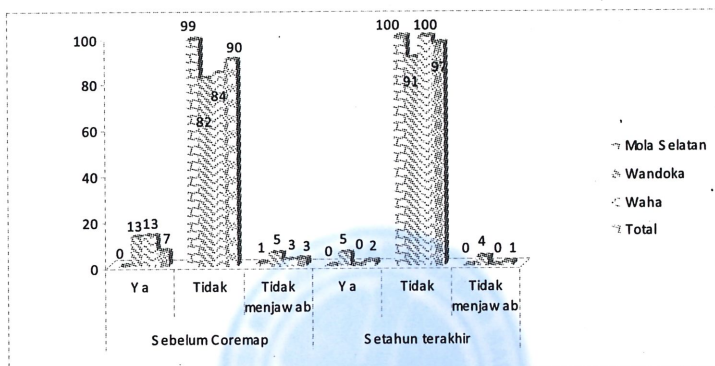
Diagram 2.4.
Persentase Penggunaan Bom Sebelum Coremap dan Satu Tahun Terakhir di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha



Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Kecenderungan yang sama juga diperlihatkan oleh perilaku dalam penggunaan sianida dalam penangkapan ikan (diagram 2.5). Tampaknya kegiatan Coremap bersama-sama dengan program sejenisnya baik dari pemerintah maupun LSM, telah berhasil menurunkan jumlah pengguna sianida atau potasium, meski tidak menghapus sama sekali. Data yang cukup menarik diperlihatkan oleh responden di Desa Waha, dimana 13 persen responden menyatakan bahwa saat ini mereka tidak lagi menggunakan potasium.

Diagram 2.5.
Presentase Penggunaan Sianida Sebelum Coremap dan Satu Tahun
Terakhir di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha



Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Menurunnya penggunaan potasium di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pantai yang dilakukan oleh ibu-ibu dan anak muda. Ibu-ibu maupun anak muda sudah tidak lagi menggunakan tuba atau racun untuk menangkap ikan, terutama untuk konsumsi sendiri. Berbeda dengan Desa Mola Selatan, nelayan di desa ini menggunakan sianida untuk keperluan komersial, baik penangkapan ikan untuk konsumsi maupun ikan hias.

Bab ini menggambarkan pengetahuan, sikap dan perilaku responden di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang dan penggunaan bahan/alat yang merusak ekosistem tersebut. Hasil BME mengungkapkan bahwa pengetahuan responden tentang fungsi ekologi terumbu karang sudah cukup baik dan bervariasi

antar lokasi. Sebagian besar responden tidak setuju pengambilan karang, penggunaan bom dan sianida dan sebaliknya setuju dengan peraturan atau larangan pemerintah dalam pengambilan karang, penggunaan bahan/alat yang merusak karang tersebut. Keadaan ini bervariasi antar lokasi. Sebagian besar responden juga mengemukakan bahwa penggunaan bom dan sianida turun secara signifikan sebelum adanya Coremap dan satu tahun terakhir ini.



BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MANFAAT SOSIAL EKONOMI COREMAP

Kegiatan Coremap yang telah berlangsung selama 5 tahun di Desa Mola Selatan, Wandoka dan Waha idealnya sudah diketahui secara luas oleh masyarakat di ketiga lokasi tersebut. Pengetahuan tentang Coremap ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di desa-desa tersebut. Bagian ini akan menggambarkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat, khususnya responden, dalam kegiatan program penyelamatan terumbu karang di daerah ini, dan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

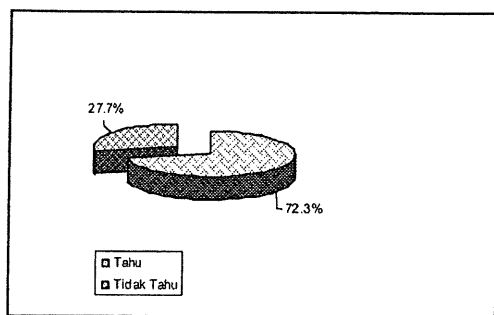
3.1. PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI

Pengetahuan masyarakat tentang Coremap dan partisipasi dalam kegiatan program ini sangat penting dan menjadi landasan untuk mencapai tujuan Coremap. Pengetahuan dan partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan kegiatan yang dilaksanakan di lokasi Coremap, termasuk lembaga yang mengelola terumbu karang baik di tingkat desa maupun tingkat masyarakat, pelatihan yang dilakukan, kegiatan ekonomi dan pembangunan.

Diagram 3.1 menggambarkan bahwa masyarakat di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, sebagian besar telah mengetahui keberadaan Coremap di desa/kelurahan. Tetapi, lebih seperempat dari total responden masih belum mengetahui adanya program penyelamatan terumbu karang di ketiga lokasi. Jumlah ini masih

masih cukup besar, karena program ini telah dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama, yaitu sejak tahun 2005.

Diagram 3.1.
Persentase Responden yang Mengetahui
Keberadaan Coremap di Desa Mola
Selatan, Kelurahan, Wandoka dan Desa
Waha, Tahun 2009



Sumber: *Data Primer BME Sosial
Ekonomi Terumbu Karang,
COREMAP-LIPI (2009)*

Gambaran pengetahuan tentang keberadaan Coremap ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan program masih belum maksimal. Sosialisasi dilakukan secara intensif pada awal pelaksanaan Coremap, namun kegiatan ini mengalami penurunan secara signifikan setelah program berjalan. Sedangkan kegiatan Coremap di ketiga lokasi masih terbatas, baik

yang berkaitan dengan pemberian dana bergulir atau *seed fund* dan pembangunan sarana dan prasarana fisik (sarpras) desa melalui *village grant*. Kegiatan-kegiatan Coremap tersebut umumnya melibatkan masyarakat dalam jumlah yang terbatas dengan sosialisasi yang juga terbatas. Masih banyak anggota masyarakat karena itu belum mengetahui keberadaan Coremap di ke tiga lokasi tersebut.

Selain itu, sosialisasi Coremap pada awal pelaksanaan program juga lebih menekankan pada pentingnya penyelamatan terumbu karang, bukan program secara utuh dan komprehensif. Masyarakat, terutama di Desa Mola Selatan, banyak yang memaknai program ini sebagai 'larangan bagi masyarakat, khususnya nelayan, untuk menangkap ikan di terumbu karang'.

Anggapan sebagian anggota masyarakat ini berkaitan erat dengan adanya program konservasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga di wilayah perairan laut ini, yang melarang kegiatan nelayan di lokasi konservasi. Padahal karang tersebut merupakan wilayah tempat nelayan menangkap ikan.

Pengetahuan dan Partisipasi dalam Kegiatan Sosialisasi Coremap

Tabel 3.1. menggambarkan sebagian kecil atau kurang dari separoh masyarakat di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha yang mengetahui kegiatan Coremap dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Kondisi ini yang cukup memprihatinkan karena program ini sudah berjalan cukup lama. Kondisi ini berkaitan erat dengan kegiatan sosialisasi awal kegiatan Coremap yang kurang dipahami yang menimbulkan 'mis persepsi', sehingga kebanyakan anggota masyarakat, khususnya di Desa mola Selatan yang beranggapan bahwa Coremap adalah program yang "mengganggu" kegiatan nelayan, bukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Sebagian kecil responden juga menjawab ketidaktahuan tentang kegiatan Coremap ini dikarenakan kesibukan mereka sehari-hari, sehingga mereka tidak mengetahui informasi kegiatan Coremap tersebut.

Sedangkan pondok informasi yang sudah dibangun di ke tiga lokasi Coremap ini belum berfungsi secara optimal. Materi informasi tentang program dan kegiatan Coremap masih sangat terbatas di pondok informasi di semua lokasi, terutama di Desa Mola Selatan dan Kelurahan Wandoka. Pondok informasi di ke dua desa ini belum berfungsi sebagai tempat atau sumber informasi, bahkan lebih banyak ditutup untuk umum. Pondok informasi di Desa Mola Selatan, sebetulnya letaknya sangat strategis, dijembatan yang menjadi pusat lalu lintas masyarakat, tetapi kegunaannya lebih terfokus sebagai tempat duduk-duduk

anggota masyarakat. Pondok informasi di Kelurahan Wandoka yang terletak di pantai sebetulnya tempat yang nyaman untuk mencari informasi tentang Coremap, tetapi sumber informasinya sangat minim, sehingga lebih banyak tutup dan digunakan pemuda untuk kegiatan informal lain. Sedangkan pondok informasi di Desa Waha, meskipun belum maksimal, tetapi telah menjadi tempat anggota masyarakat untuk mengetahui kegiatan Coremap dan kegiatan informal lainnya, seperti main kartu dan mengobrol dan melihat televisi.

Kondisi yang lebih memprihatinkan juga terungkap dari hasil survei ini, diindikasikan dari sedikitnya anggota masyarakat yang terlibat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang dilakukan oleh Coremap. Tabel 3.1 menginformasikan hanya 17,9 persen dari yang mengetahui atau hanya 8,7 persen dari total responden yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Keadaan ini mengindikasikan terbatasnya lingkup kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Coremap di ketiga lokasi tersebut.

Tabel 3.1.

Persentase Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Coremap di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Kegiatan	Mengetahui % (n)	Berpartisipasi % (n)
Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat N : 173	48,6 (84)	17,9 (15)
Perlindungan/pengawasan pesisir dan laut N : 173	43,9 (76)	14,5 (11)

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Pola yang serupa juga digambarkan pada pengetahuan dan partisipasi masyarakat tentang kegiatan Coremap yang berkaitan dengan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut. Responden yang mengetahui dan berpartisipasi dalam kegiatan ini juga rendah, persentasenya bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Gambaran ini sebetulnya bertolak belakang dengan pandangan sebelumnya 'mis persepsi' tentang Coremap yang dianggap program yang 'mengganggu' kegiatan nelayan di karang. Persentase responden yang menjawab ini seharusnya lebih besar bukan bahkan sebaliknya. Fakta ini menginformasikan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Coremap, dikarenakan kurangnya sosialisasi, terutama setelah program ini berjalan.

Pengetahuan dan Partisipasi dalam Kelembagaan

Bagian ini menggambarkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kelembagaan yang dikembangkan Coremap di lokasi, yaitu di tingkat desa dan masyarakat. Kelembagaan di tingkat desa terdiri dari dua lembaga, yaitu Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Sedangkan kelembagaan di tingkat masyarakat adalah kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri dari kelompok konservasi, kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dan kelompok jender.

Kelembagaan di Tingkat Desa

- **Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK)**

Tabel 3.2 menginformasikan bahwa terbatasnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam Lembaga Pengelola Sumber

Daya Terumbu Karang (LPSTK) di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Kurang dari sepertiga responden yang mengetahui keberadaan LPSTK, padahal lembaga ini telah dibentuk sejak awal kegiatan Coremap di ketiga lokasi. Responden yang mengetahui adanya LPSTK paling banyak terdapat di Desa Waha dan paling sedikit di Desa Mola Selatan, sedangkan di Kelurahan Wandoka berada diantara ke dua desa tersebut.

Tabel 3.2.
Persentase Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan LPSTK di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Kegiatan	Mengetahui % (n)	Berpartisipasi % (n)
Pembentukan Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) N : 173	32,4 (56)	19,6 (11)
Kegiatan LPSTK N : 173		
• Penyusunan RPTK	28,3 (49)	14,3 (7)
• Pembangunan Desa	34,1 (59)	20,3 (12)
• Pengembangan DPL	33,5 (58)	17,2 (10)
• Sosialisasi, pembimbingan, monitoring	34,7 (60)	26,7 (16)

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, CCOREMAP-LIPI (2009)*

Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembentukan LPSTK jauh lebih sedikit, sekitar 20 persen (seperlima) dari jumlah responden yang tahu tentang pembentukan lembaga ini atau hanya 6 persen

dari total responden. Kurangnya partisipasi ini berkaitan erat dengan kurang dan pendeknya sosialisasi tentang pembentukan lembaga yang menjadi inti atau 'core' dalam pengembangan kegiatan pengelolaan terumbu karang di ketiga lokasi ini.

Gambaran tentang terbatasnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat tentang pembentukan LPSTK juga mengindikasikan terbatasnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan lembaga ini. Kegiatan LPSTK terdiri dari penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK), pembangunan sarana prasarana (sarpras) desa, pengembangan daerah perlindungan laut (DPL) dan pembimbingan kepada pokmas dan anggota masyarakat di desa Coremap.

Penyusunan RPTK merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan terumbu karang. Semua kegiatan harusnya mengacu pada RPTK yang disepakati bersama oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, potensi dan kondisi di desa masing-masing. Tetapi hal ini sulit untuk diperoleh karena minimnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat.

Tabel 3.2 mengungkapkan responden yang mengetahui kegiatan penyusunan RPTK persentasinya sangat kecil, kurang dari 30 persen. Responden yang sangat terbatas ini ternyata sebagian besar tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Responden kurang dari 15 persen atau hanya 7 orang dari 173 responden berpartisipasi dalam penyusunan RPTK.

Gambaran ini mencerminkan bahwa RPTK yang telah disusun di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha kurang mewakili aspirasi sebagian besar masyarakat. Penyusunan RPTK lebih didominasi oleh pihak Coremap di tingkat kabupaten berdasarkan hasil penggalan yang dihadiri oleh sekelompok kecil anggota masyarakat di ketiga lokasi tersebut.

Gambaran yang serupa juga terjadi pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) desa. Pembangunan sarpras desa

bertujuan untuk mendukung kegiatan Coremap di lokasi. Masyarakat yang tahu dan berpartisipasi masih sangat terbatas. Hanya sekitar sepertiga responden yang tahu adanya kegiatan ini dan hanya seperlima dari responden yang tahu tersebut berpartisipasi.

Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan masih terbatasnya kegiatan dan kurangnya sosialisasi terhadap kegiatan yang terbatas tersebut. Kegiatan pembangunan sarpras desa bervariasi antar lokasi di sesuaikan dengan kebutuhan (lihat penjelasan di bagian berikut).

Kegiatan LPSTK yang juga sangat penting adalah mengembangkan Daerah Perlindungan Laut (DPL). DPL sesuai dengan namanya merupakan suatu daerah perairan laut dengan luas tertentu yang khusus diperuntukkan bagi perlindungan terumbu karang dan tumbuh kembangnya ikan-ikan dan biota laut lain. Daerah ini karena itu dikelola secara khusus, sehingga bebas dari eksploitasi penangkapan ikan secara besar-besaran dan gangguan dari pemanfaatan lainnya.

DPL dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di laut, terutama kegiatan kenelayanan dan transportasi laut. Kesepakatan dan partisipasi masyarakat karena itu sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan DPL.

Tetapi hasil BME menginformasikan bahwa pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan DPL masih sangat minim. Hanya sepertiga responden yang mengetahui pengembangan DPL dan kurang dari seperlima total responden yang tau tersebut berpartisipasi dalam pengembangan DPL atau 10 orang dari 173 responden.

Minimnya pengetahuan dan partisipasi ini mengindikasikan minimnya sosialisasi pengembangan DPL kepada masyarakat dan dominasi pengurus LPSTK dan pihak PMU kabupaten dalam penentuan lokasi dan pembangunan DPL terutama di Kelurahan

Wandoka dan Desa Waha. Sedangkan minimnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat di Desa Waha dapat dimaklumi karena DPL tidak dikembangkan di lokasi ini.

Selain itu, LPSTK juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi program Coremap, pembimbingan dan memonitor (memantau) semua kegiatan Coremap di lokasi. Kegiatan LPSTK ini melibatkan anggota kelompok masyarakat yang dibentuk Coremap dan anggota masyarakat lainnya.

Namun hasil BME menginformasikan bahwa pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, pembimbingan dan monitoring yang dilakukan oleh LPSTK masih sangat terbatas. Hanya sekitar sepertiga responden yang tahu adanya kegiatan LPSTK tersebut dan hanya sekitar seperempat dari responden yang tahu tersebut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Keadaan ini mengindikasikan dua hal. Pertama, LPSTK kurang melakukan kegiatan sosialisasi, pembimbingan dan monitoring pelaksanaan Coremap di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Ke dua, LPSTK melakukan kegiatan tersebut tetapi hanya melibatkan sekelompok kecil anggota pokmas dan/atau masyarakat. Kebanyakan anggota pokmas dan masyarakat karena itu tidak mengetahui kegiatan-kegiatan LPSTK tersebut.

- **Lembaga Keuangan Mikro (LKM)**

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berfungsi sebagai pengelola mengelola dana bergulir atau *seed fund* untuk usaha ekonomi produktif (UEP) yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (pokmas) dan kelompok jender. UEP bervariasi antar lokasi dan kelompok idealnya sesuai dengan RPTK.

Tabel 3.3 mengungkapkan bahwa pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan LKM masih terbatas. Pembentukan

LKM hampir tidak diketahui oleh masyarakat, hampir 90 persen responden tidak tahu adanya pembentukan lembaga ini. Padahal, LKM dibentuk bersamaan dengan pembentukan LPSTK. Responden yang tahu persentasenya sangat kecil, dan sebagian besar dari mereka ini tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Minimnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan LKM disebabkan tiga hal. Pertama, sosialisasi pembentukan lembaga ini masih terbatas, sehingga kebanyakan anggota masyarakat tidak mempunyai informasi. Kedua, masyarakat kebanyakan masih awam dengan lembaga keuangan ini, sehingga kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembentukan lembaga ini. Ke tiga, masyarakat yang tahu tidak punya akses atau tidak sempat untuk berpartisipasi.

Kegiatan utama dari LKM adalah mengelola dana untuk usaha ekonomi produktif (UEP). Hanya sekitar sepertiga responden yang mengetahui kegiatan LKM ini dan dari responden tersebut hanya sekitar sepertiga yang berpartisipasi.

Terbatasnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan UEP yang dilakukan oleh LKM berkaitan erat dengan terbatasnya sosialisasi dan kegiatan UEP di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Sosialisasi tentang kegiatan ekonomi produktif dilakukan pada awal pelaksanaan Coremap di ke tiga desa ini, namun implementasi kegiatan ini memerlukan waktu yang lama, sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap program ini. Sedangkan kegiatan LKM hanya terbatas pada pembagian dana bergulir dan pembagian ini hanya dilakukan dalam jumlah yang sangat terbatas ketika dana tersebut turun ke lokasi Coremap.

Tabel 3.3.
 Persentase Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan
 LKM di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha,
 Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Kegiatan	Mengetahui % (n)	Berpartisipasi % (n)
Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) N : 173	12,7 (22)	31,8 (7)
Kegiatan LKM N : 173		
• Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	35,3 (61)	34,4 (21)
• Pembimbingan/pendampingan	30,6 (53)	18,9 (10)
• Monitoring	28,9 (50)	18 (9)

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Hasil BME juga mengungkapkan minimnya pengetahuan dan partisipasi responden dalam kegiatan pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan oleh LKM. Keadaan ini dikarenakan kegiatan LKM yang lebih terfokus pada pembagian dan penyetoran dana, sedangkan pelaksanaan usaha diserahkan sepenuhnya pada anggota pokmas/jender yang mendapat dana. Selain itu, kapasitas LKM untuk melakukan pembimbingan juga terbatas, karena terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pengembangan usaha ekonomi yang beraneka ragam di masing-masing lokasi.

Gambaran serupa juga terjadi pada kegiatan monitoring kegiatan ekonomi oleh LKM. Pengetahuan dan partisipasi responden juga sangat terbatas, persentasenya bahkan lebih rendah daripada pendampingan dan pembimbingan. Monitoring dilakukan pada

beberapa anggota pokmas/jender pada saat pengembalian dana. Sedangkan anggota pokmas/jender yang mendapat dana jumlahnya masih terbatas.

- **Kelompok Masyarakat (Pokmas)**

Kelompok masyarakat (pokmas) merupakan kelembagaan vital yang menjadi inti atau *core* dalam pelaksanaan kegiatan Coremap di tingkat lokasi Coremap. Pokmas terdiri dari tiga kelompok, yaitu pokmas yang semua anggotanya adalah laki-laki, pokmas jender yang semua anggotanya perempuan, dan pokmas pengawasan yang anggotanya umumnya laki-laki, kecuali di Desa waha juga terdapat anggota perempuan. Pokmas dan pokmas jender terfokus pada usaha ekonomi produktif, sedangkan pokmas pengawasan pada kegiatan pengawasan/patroli perairan laut.

Gambaran pengetahuan masyarakat tentang pokmas dan partisipasi dalam kegiatan pokmas serupa dengan LPSTK dan LKM, masih sangat terbatas. Kurang dari sepertiga responden yang tahu tentang pembentukan pokmas dan dari responden yang tahu ini kurang dari sepertiganya berpartisipasi dalam kegiatan pokmas. Terbatasnya pengetahuan seperti alasan sebelumnya dikarenakan keterbatasan sosialisasi, sehingga hanya sekelompok kecil anggota masyarakat punya akses informasi, terutama anggota masyarakat yang dekat dengan pihak desa dan PMU kabupaten dan Seto. Keadaan ini menimbulkan kesan di sebagian anggota masyarakat bahwa kegiatan Coremap, termasuk pokmas, hanya dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat yang mempunyai akses terhadap program tersebut.

Pengetahuan dan partisipasi masyarakat dari ke tiga jenis pokmas yang paling rendah adalah pokmas pengawasan, Pokmas pengawasan mempunyai tugas khusus mengawasi perairan laut dari kegiatan yang merusak, seperti penggunaan bius dan bom,

jumlah anggotanya juga sangat terbatas 9 orang termasuk ketua dan bendahara. Kegiatan yang dilakukan pokmas pengawasan adalah melakukan patroli secara regular, karena itu seharusnya kegiatan mereka diketahui masyarakat secara luas.

Fakta minimnya pengetahuan masyarakat ini mengindikasikan dua hal. Pertama, kegiatan patroli atau pengawasan yang dilakukan oleh pokmas pengawasan masih sangat terbatas, sehingga luput dari pengetahuan masyarakat luas. Kedua, kurangnya sosialisasi tentang kegiatan pokmas, sehingga kebanyakan responden tidak tahu dan/atau kurang peduli akan kegiatan yang dilakukan oleh pokmas tersebut.

Tabel 3.4.

Persentase Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kelompok Masyarakat di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Kegiatan	Mengetahui % (n)	Berpartisipasi % (n)
Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) N : 173	32,9 (57)	31,6 (18)
Kegiatan Pokmas N : 173		
• Pokmas Konservasi/pokmaswas	29,5 (51)	17,6 (9)
• Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	34,1 (59)	30,5 (18)
• Pokmas Wanita/jender	30,6 (53)	18,9 (10)

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Sedangkan minimnya partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan dua hal. Pertama, jumlah anggota pokmas sangat terbatas dan setiap desa hanya terdapat satu pokmas pengawasan. Ke

dua, masyarakat menganggap partisipasi hanya dapat dilakukan apabila mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan pokmas pengawasan. Padahal, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga dapat dilakukan secara tidak langsung, seperti menegur atau melaporkan nelayan yang menangkap ikan secara ilegal.

Dari ke tiga jenis pokmas, pokmas UEP paling banyak diketahui oleh masyarakat, meskipun persentasenya masih rendah, hanya 34 persen atau sekitar sepertiga dari total responden. Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat kegiatan Coremap sudah cukup lama dilaksanakan di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, seharusnya informasi tentang kegiatan ini sudah menyebar luas di ketiga lokasi. Informasi ini masih terbatas pada anggota pokmas yang mendapatkan dana dan sekelompok kecil kerabat atau tetangga. Alasan lain adalah kurangnya informasi tentang kegiatan ekonomi yang sudah berjalan, karena ketertutupan anggota yang mendapat dana bergulir ini dan usaha ekonomi belum berkembang pesat atau bahkan sebaliknya mengalami kegagalan, sehingga informasinya masih sangat terbatas.

Sedangkan minimnya keterlibatan berkaitan erat dengan terbatasnya dana *seed fund* and kelompok/anggota kelompok yang mendapat dana. Sedangkan dana bergulir yang diharapkan dari anggota yang telah mendapat dana masih sangat minim hanya beberapa, karena kebanyakan anggota belum mengembalikan dana, karena belum jatuh tempo, usahanya gagal dan tidak mau mengembalikan. Keadaan ini terjadi di semua lokasi dengan tingkatan yang bervariasi dari Kelurahan Wandoka, Desa Waha dan Desa Mola Selatan.

Pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pokmas jender berada diantara pokmas pengawasan dan pokmas UEP. Proporsinya masih rendah, kurang dari sepertiga dari total responden untuk pengetahuan dan kurang dari seperlima untuk partisipasi. Rendahnya pengetahuan dan partisipasi mempunyai

alasan yang serupa dengan pokmas UEP, kurangnya informasi dan terbatasnya dana yang diberikan sehingga membatasi jumlah keterlibatan perempuan dalam pokmas ini.

• Pelatihan

Pelatihan dan pendampingan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, khususnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan terumbu karang. Tetapi hasil BME menginformasikan bahwa kedua kegiatan ini masih sangat terbatas.

Tabel 3.5 menggambarkan kurang dari seperempat responden mengetahui adanya pelatihan yang dilakukan oleh Coremap. Responden yang tahu ini kebanyakan tidak berpartisipasi dalam pelatihan tersebut. Keadaan ini berkaitan erat dengan terbatasnya pelatihan yang dilakukan Coremap di ketiga lokasi kajian dan di tingkat kabupaten. Pelatihan yang dilaksanakan di kabupaten terutama pada awal kegiatan Coremap hanya melibatkan beberapa tokoh saja.

Tabel 3.5.

Persentase Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pelatihan di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Kegiatan	Mengetahui	Berpartisipasi
	% (n)	% (n)
Pelatihan	23,1	(30,0)
N : 173	(40)	(12)
Pendampingan	20,2	11,4
N : 173	(35)	(4)

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Gambaran pengetahuan dan partisipasi responden tentang kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pengelola Coremap di tingkat desa lebih memprihatinkan. Keadaan ini diindikasikan dari lebih rendahnya persentase responden, hanya 20 persen responden yang tau dan kebanyakan responden tersebut tidak terlibat. Hanya 4 responden dari 173 responden yang berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pengelola program di ke tiga lokasi. Hal ini berkaitan dengan minimnya kegiatan pendampingan dan sosialisasi dari kegiatan tersebut.

- **Kegiatan UEP**

Kegiatan atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan kegiatan yang sangat penting dan diharapkan oleh masyarakat di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. UEP adalah upaya Coremap untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang tidak merusak terumbu karang dan lingkungan di sekitarnya. UEP diberikan pada masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat (pokmas dan kelompok jender) melalui dana bergulir atau *seed fund*.

Hasil BME menginformasikan anggota masyarakat yang menerima *seed fund* masih sangat terbatas. Keadaan ini digambarkan dari kecilnya proporsi responden yang menerima, sekitar seperlima dari total responden (atau 34 dari 173 responden).

Rendahnya proporsi ini berkaitan erat dengan masih terbatasnya dana yang digulirkan oleh Coremap, masih kurang sebanding dengan jumlah penduduk mengharapakan dana tersebut di ketiga lokasi. Pada awal Oktober 2009, Coremap baru menggulirkan dana sebanyak 2 kali sejak program ini

dilaksanakan tahun 2005, yaitu dana anggaran tahun 2007 dan 2008.

Dana yang diberikan pada pokmas dan kelompok jender kebanyakan belum bergulir kepada anggota kelompok lainnya, karena anggota pokmas yang menerima dana anggaran tahun 2007 belum sepenuhnya mengembalikan dana meskipun sudah jatuh tempo. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, penerima dana belum mampu mengembalikan dana karena usaha kurang berhasil dan/atau gagal. Kedua, penerima dana belum mau mengembalikan dana karena merasa tidak perlu mengembalikan uang dari pemerintah. Sedangkan usaha ekonomi dari dana bergulir anggaran tahun 2008 masih berlangsung, sehingga dananya masih dalam proses pengembalian.

Responden yang menerima dana UEP dari Coremap sebagian besar (67,6 persen atau sebanyak 27 dari 34 rumah tangga) menyatakan dana tersebut meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hanya sebagian kecil yang mengemukakan dana ini tidak meningkatkan pendapatan (20,6 persen) dan sisanya tidak menjawab (8,8 persen) dan tidak tahu 2,9 persen.

Gambaran di atas megindikasikan sinyal yang positif, karena dana UEP dapat membantu rumah tangga dalam meningkatkan usaha ekonomi, seperti perdagangan ikan, sembako dan solar/bahan bakar pompong serta pembuatan dan penjualan kue/makanan. Kondisi ini terdapat di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha dengan tingkatan yang bervariasi antar lokasi.

Sedangkan responden yang menyatakan dana bergulir tidak meningkatkan pendapatan rumah tangga memberikan berbagai alasan. Sebagian besar (85,7 persen) menginformasikan dana terlalu kecil, sehingga belum mampu mendukung kegiatan ekonomi rumah tangga, yang pada akhirnya belum mampu

meningkatkan pendapatan. Sedangkan sisanya mengemukakan usaha belum berhasil, merugi dan/atau gagal, dan dana digunakan untuk keperluan keluarga lainnya, seperti kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak.

Dukungan Pengelola Coremap dan Masyarakat

Dukungan pengelola Coremap dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan Coremap di tingkat lokasi. Dukungan ini bervariasi antara para pihak dan lokasi Coremap.

- **Dukungan Pengelola Coremap**

Dukungan pengelola Coremap di tingkat lokasi digambarkan oleh kegiatan motivator desa (MD) dan fasilitator masyarakat atau *community/field facilitator* (CF/FF). Kegiatan MD dan CF berupa sosialisasi, pembimbingan dan/atau monitoring kegiatan Coremap di desa, termasuk kegiatan usaha ekonomi produktif, pembangunan sarpras desa, pengembangan DPL dan pengawasan laut.

Tabel 3.6 menginformasikan minimnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Coremap, khususnya motivator desa (MD) dan fasilitator masyarakat (CF/FF). Hanya sekitar sepertiga dari total responden yang tau adanya salah satu kegiatan MD, yaitu melakukan sosialisasi kegiatan Coremap, pembimbingan dan monitoring. Keadaan ini terutama terjadi di Kelurahan Wandoka dan Desa Mola Selatan, sedangkan MD di Desa Waha cukup diketahui keaktifannya oleh banyak anggota masyarakat.

Responden yang tahu adanya kegiatan MD ini kebanyakan tidak berpartisipasi dalam kegiatan MD. Hal ini berkaitan erat dengan terbatasnya kegiatan MD yang cenderung pasif menunggu kegiatan yang dilakukan oleh pihak PMU kabupaten, terutama di

Desa Mola Selatan dan Kelurahan Wandoka. Selain itu, kapasitas MD juga masih terbatas, bahkan ada MD di kedua desa/kelurahan tersebut yang kurang memahami Coremap, tugas dan kewajibannya. Terbatasnya kapasitas MD ini berimplikasi pada minimnya kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan kegiatan Coremap di lokasi-lokasi tersebut.

Gambaran terbatasnya dukungan pengelola Coremap juga terjadi pada fasilitator (CF/FF). Keadaan ini diindikasikan dari rendahnya persentase pengetahuan dan partisipasi responden dalam kegiatan CF, persentase ini bahkan lebih rendah daripada persentase dalam kegiatan MD (lihat table 3.6). Responden yang tahu tersebut sebagian besar tidak berpartisipasi dalam salah satu kegiatan CF, yaitu melakukan sosialisasi kegiatan Coremap, pengembangan usaha ekonomi produktif, pembangunan sarpras desa, pengembangan DPL dan pengawasan terumbu karang.

Tabel 3.6.

Persentase Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Motivator Desa (MD) dan Fasilitator Masyarakat (CF) di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Kegiatan	Mengetahui % (n)	Berpartisipasi % (n)
Kegiatan MD N : 173	34,7 (60)	30,0 (18)
Kegiatan CF/FF/Fasla N : 173	32,4 (56)	28,6 (16)
Dukungan Masyarakat N : 173	40,5 (70)	37,1 (26)

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Rendahnya pengetahuan dan partisipasi responden dalam kegiatan CF berkaitan erat dengan terbatasnya kegiatan CF di ketiga lokasi. Keadaan ini berkaitan dengan beberapa hal, seperti:

- CF cenderung kurang aktif melakukan kegiatan sendiri, kegiatan dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Seto dan pihak PMU kabupaten
- Beberapa CF juga tidak tinggal di lokasi, sehingga mengurangi intensitas dan frekuensi dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Salah seorang CF di Kelurahan Wandoka bahkan hanya tiga kali berkunjung ke lokasi selama sepuluh bulan masa kerjanya
- Kapasitas atau kemampuan CF mengenai Coremap masih terbatas, hal ini berimplikasi pada tidak optimalnya atau minimnya kemampuan CF dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

3.2. MANFAAT SOSIAL

Manfaat sosial Coremap adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara umum atau sebagian anggota masyarakat yang berasal dari kegiatan Coremap, khususnya dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) fisik desa yang bersumber dari *village grant*. Kegiatan pembangunan bervariasi antar daerah, ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di suatu desa yang telah dicantumkan dalam rencana pengelolaan terumbu karang (RPTK). Kegiatan pembangunan sarpras karena alasan tertentu sebagian mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.

Besarnya manfaat sosial kegiatan Coremap bagi masyarakat diindikasikan dari dua hal. Pertama adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sarpras fisik yang dilakukan di lokasi Coremap. Kedua adalah manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat yang diwakili oleh responden dalam kajian ini.

- **Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Fisik**

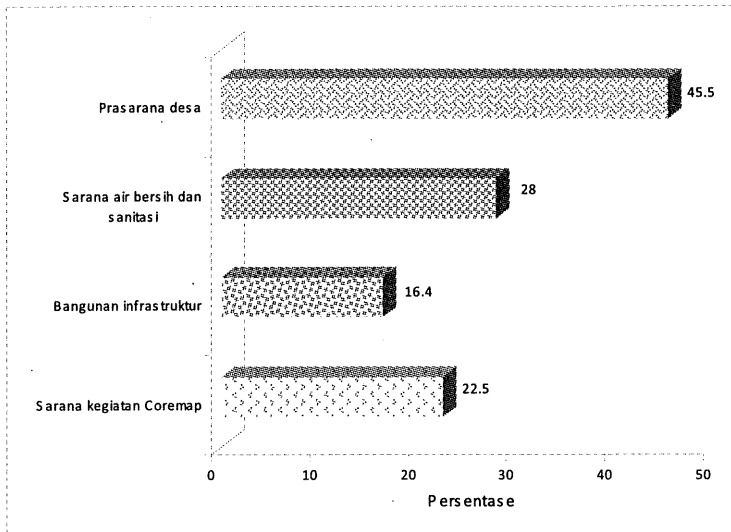
Kegiatan Coremap yang cukup penting di lokasi adalah pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) fisik. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pelestarian terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi. Partisipasi masyarakat karena itu diperlukan untuk kelancaran dan keberhasilan pembangunan tersebut.

Pembangunan sarpras fisik bervariasi antar desa, disesuaikan dengan kebutuhan. Jenis sarpras dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu 1) sarana kegiatan Coremap, seperti pondok informasi dan pondok pengawasan, 2) infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan pagar, 3) sarana air bersih dan sanitasi lingkungan, seperti MCK, bak penampung dana atau saluran air dan tong sampah, dan 4) prasarana desa, seperti sarana ibadah dan genset.

Diagram 3.2 menginformasikan bahwa hanya sebagian kecil dari responden yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) dari village grant Coremap di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Partisipasi responden tertinggi terdapat pada pembangunan prasarana desa, meskipun partisipasi ini masih cukup rendah, kurang dari separoh responden. Pembangunan yang dilakukan adalah pemberian fasilitas dan sarana ibadah, terutama terdapat di Kelurahan Wandoka dan Desa Mola Selatan.

Sebaliknya, partisipasi terendah disumbangkan oleh pembangunan infrastruktur, kurang dari seperlima total responden. Pembangunan yang dilakukan adalah pembuatan jalan setapak dari jalan raya ke pondok informasi yang terletak di pinggir pantai di Kelurahan Wandoka, dan jembatan perintis di Desa Nelayan Bakti (Desa Mola Selatan) sebelum pemekaran. Kegiatan ini melibatkan sedikit anggota masyarakat, karena skala pembangunan relatif kecil, sebagai tenaga upahan.

Diagram 3.2.
Persentase Responden yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Sarpras
di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha,
Tahun 2009



Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP - LIPI (2009)*

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana kegiatan Coremap, seperti pondok informasi dan pondok pengawasan, juga sangat terbatas, kurang seperempat dari total responden. Kegiatan ini terdapat di semua lokasi kajian, dengan persentase tertinggi terdapat di Desa Waha dimana hampir separoh responden berpartisipasi, dan sebaliknya persentase terendah, hanya seperdelapan total responden di Desa Mola Selatan.

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan juga cukup rendah, sekitar seperempat dari total responden. Pembangunan yang dilakukan berupa bak penampungan dan saluran air bersih di Desa Waha dan tong sampah dan MCK di Desa Mola Selatan. Mengingat

pembangunan ini skalanya kecil dan memerlukan keterampilan spesifik, maka anggota masyarakat yang terlibat masih sangat terbatas, sebagai tenaga upahan.

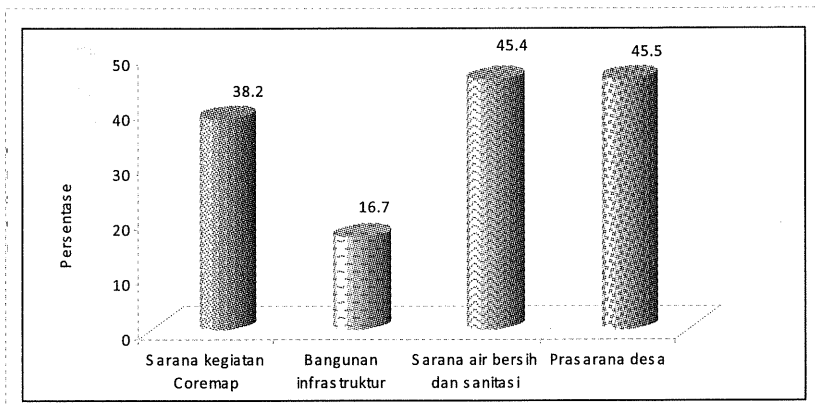
- **Manfaat Pembangunan**

Diagram 3.3 menggambarkan masih terbatasnya manfaat pembangunan sarpras fisik di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Responden yang menyatakan pembangunan sarpras bermanfaat persentase tertinggi (45 persen) berasal dari pembangunan prasarana desa dan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan. Sebaliknya, persentase terendah berasal dari pembangunan infrastruktur.

Pembangunan prasarana desa di Kelurahan Wandoka dan Desa Waha menurut hampir separoh responden bermanfaat bagi mereka dan masyarakat. Hal ini dapat dimengerti karena pembangunan yang dilakukan adalah untuk fasilitas ibadah di Masjid, sehingga mereka dapat memanfaatkan sarana tersebut, terutama ketika mereka beribadah di Masjid tersebut.

Hampir separoh responden juga mengemukakan bahwa pembangunan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan bermanfaat bagi rumah tangga dan masyarakat di lokasi kajian. Di Desa Waha, pembangunan bak penampung dan saluran air telah berhasil mengurangi kesulitan air bersih di permukiman sekitar pondok informasi, meskipun cakupannya masih sangat terbatas. Demikian juga pembangunan MCK di pondok informasi telah dimanfaatkan oleh warga di sekitar pondok tersebut. Pembuatan tong dan bak sampah di Desa Mola Selatan juga mengurangi masalah sampah di desa ini, meskipun belum optimal.

Diagram 3.3.
 Persentase Responden yang Menyatakan Pembangunan Sarpras
 Bermanfaat di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa
 Waha, Tahun 2009



Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP - LIPI (2009)*

Dari diagram juga diketahui bahwa pembangunan sarana kegiatan Coremap, khususnya pondok informasi, juga masih rendah. Keadaan ini terutama terjadi di Kelurahan Wandoka dan Desa Mola Selatan dimana pondok informasi kurang bermanfaat, karena kurangnya kegiatan dan minimnya materi informasi di pondok tersebut. Selain itu, lokasi pondok di Kelurahan Wandoka di dekat pantai relatif berjarak dengan permukiman penduduk.

Sedangkan manfaat pembangunan infratraktur persentasenya paling rendah, hanya 16 persen. Pembangunan jembatan perintis di Desa Desa Mola Selatan Lama terletak di Dusun Nelayan Bakti (sekarang menjadi Desa Nelayan Bakti), Jembatan ini cukup jauh dari pusat desa Mola Selatan dan menghubungkan beberapa rumah. Karena itu hanya sebagian kecil anggota masyarakat, terutama yang rumahnya di sekitar jembatan, yang telah

memanfaatkan sarana tersebut. Pembangunan jalan setapak dari jalan raya ke pondok informasi (sekitar 25 meter) manfaatnya juga terbatas pada anggota masyarakat yang berada di sekitar jalan tersebut.

3.3. MANFAAT EKONOMI

Manfaat ekonomi Coremap adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara umum atau sebagian anggota masyarakat yang berasal dari kegiatan Coremap, khususnya dari usaha ekonomi produktif (UEP) atau kegiatan matapencaharian alternatif (Alternative Income Generating Activities atau AIGA) yang bersumber dari *seed grant*. Kegiatan UEP ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang telah dicantumkan dalam rencana pengelolaan terumbu karang (RPTK). Kegiatan UEP karena alasan tertentu sebagian mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.

Pada bagian ini akan digambarkan manfaat ekonomi kegiatan Coremap dalam bentuk pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Bagian ini menganalisa seberapa jauh kegiatan UEP Coremap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan Coremap.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di lokasi penelitian adalah pendapatan rumah tangga, pendapatan per kapita, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan (nelayan), dan pendapatan rumah tangga penerima dana usaha ekonomi produksi atau anggota pokmas UEP. Disamping itu juga dilihat perubahan pendapatan yang diterima masyarakat terutama pendapatan dari kegiatan perikanan tangkap setelah adanya program Coremap. Perubahan pendapatan perikanan tangkap dilihat dari persepsi masyarakat

terhadap pendapatan yang mereka peroleh pada saat survei dibandingkan sebelum adanya kegiatan Coremap.

Pendapatan rumah tangga di Kabupaten Wakatobi tahun 2009 diperoleh dari hasil survei terhadap 173 rumah tangga di tiga desa yang juga disurvei pada tahun 2006, yaitu Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Pada 2008 ketiga desa/kelurahan ini telah mekar menjadi 8 desa/keurahan, tetapi dalam penelitian ini desa pecahan dimasukkan ke dalam desa induk (tahun 2006).

Pendapatan didefinisikan sebagai pendapatan bersih yang diperoleh oleh rumah tangga dalam satu bulan atau satu tahun terakhir. Pendapatan bersih dihitung dari selisih antara pendapatan kotor dengan biaya produksi. Pendapatan bersih merupakan hasil penjumlahan dari pendapatan bersih semua anggota rumah tangga yang bekerja. Selain pendapatan rumah tangga penelitian ini juga akan mendeskripsikan pendapatan per kapita yang merupakan hasil pembagian antara pendapatan rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga. Sementara itu pendapatan rumah tangga dari kenelayanan (nelayan) yang menjadi fokus penelitian merupakan penjumlahan pendapatan anggota rumah tangga yang bekerja sebagai nelayan, baik sebagai pekerjaan utama maupun sebagai pekerjaan tambahan.

3.3.1. Pendapatan rumah tangga

Pendapatan rumah tangga merupakan keseluruhan (jumlah) pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap anggota rumah tangga. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga di ke tiga lokasi penelitian lebih besar dari 1 juta yaitu Rp. 1.364.642 per bulan.

Tabel 3.7.
 Statistik pendapatan rata-rata rumah tangga di Desa Mola Selatan,
 Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi,
 Tahun 2009

Statistik	Desa			Total
	Mola	Wandoka	Waha	
Rata-rata Rumah Tangga (RT)	881.521	1.205.400	2.612.403	1.364.642
Median pendapatan RT	691.667	1.000.000	2.546.667	990.000
Minimum pendapatan RT	200.000	132.000	850.000	132.000
Maksimum pendapatan RT	7.200.000	5.100.000	5.140.000	7.200.000
Pendapatan per kapita	193.991	256.946	663.448	317.839

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang*,
 COREMAP-LIPI (2009)

Rata-rata pendapatan rumah tangga bervariasi antar lokasi. Rata-rata pendapatan tertinggi berasal dari rumah tangga di Desa Waha. Apabila dibandingkan dengan dua desa lainnya maka dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga di Desa Waha, dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pendapatan rata-rata rumah tangga di Kelurahan Wandoka, dan lebih dari tiga kali lipat dari rumah tangga di Desa Mola Selatan. Hanya pendapatan rata-rata rumah tangga di Desa Waha yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata total untuk ke tiga lokasi penelitian. Dengan demikian rumah tangga di Desa Waha mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga di dua desa lainnya.

Tingginya variasi tingkat pendapatan rumah tangga di ke tiga desa penelitian sangat terkait dengan sumber pendapatan rumah tangga. Data menunjukkan bahwa sumber-sumber pendapatan

utama berbeda di ke tiga desa. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing sumber mata pencaharian rumah tangga terhadap pendapatan rumah tangga secara keseluruhan (Tabel 3.8.). Kontribusi masing-masing sumber pendapatan rumah tangga di Desa Waha dan Kelurahan Wandoka cukup tinggi untuk pendapatan rumah tangga, hampir merata dibandingkan dengan rumah tangga di Desa Mola yang sebagian besar pendapatan bersumber dari perikanan, padahal perikanan menghasilkan pendapatan yang rendah.

Tabel 3.8.

Persentase Kontribusi Sumber Pendapatan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Sumber pendapatan	Desa			Total
	Mola	Wandoka	Waha	
Perikanan tangkap dan budidaya	63,70	23,40	33,66	44,29
Pertanian	0,00	23,51	19,04	11,66
Perdagangan	15,44	12,95	6,89	12,77
Buruh dan karyawan	1,25	22,24	21,95	12,47
Industri	5,08	5,15	0,00	3,99
Lainnya	14,53	12,98	18,45	14,91

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Kontribusi perikanan tangkap dan budidaya terhadap pendapatan rumah tangga di Desa Waha lebih tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Namun pendapatan rumah tangga yang bersumber dari perikanan tangkap dan budidaya tersebut besarnya lebih tinggi di Desa Waha daripada di Desa Mola Selatan. Rata-rata pendapatan yang diperoleh rumah tangga dari perikanan tangkap dan budidaya di Desa Waha adalah Rp. 1,1 juta, Desa Mola Selatan Rp. 798 ribu dan Kelurahan

Wandoka sebesar Rp. 651 ribu per bulan. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jenis ikan yang ditangkap terkait dengan teknologi penangkapan ikan yang digunakan. Sebagian besar nelayan di Desa Waha merupakan nelayan tuna atau cakalang yang mempunyai nilai jual cukup tinggi sehingga berpengaruh pada besarnya pendapatan yang diperoleh. Hasil wawancara dengan beberapa nelayan dan penjual ikan (papalele) harga jual ikan tuna adalah Rp. 40.000 per kg, jauh lebih tinggi bila dibandingkan harga jual ikan lainnya yang biasa ditangkap oleh nelayan seperti ikan mangkela, malakis dan balake yang harga jualnya Rp. 10.000 per 10 ekor.

Median Pendapatan Rumah Tangga

Selain rata-rata, gambaran tentang pendapatan rumah tangga dapat diketahui dari median. Median menunjukkan bahwa sekitar 50 persen data berada di bawah dan di atas nilai median tersebut. Tabel 3.7. menunjukkan bahwa median pendapatan rumah tangga di lokasi penelitian adalah Rp. 990 ribu. Angka ini menunjukkan bahwa 50 persen pendapatan rumah tangga di lokasi penelitian berada di bawah dan di atas median tersebut. Median pendapatan rumah tangga di lokasi penelitian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan rumah tangganya. Hal ini mengindikasikan bahwa data pendapatan tidak tersebar secara normal, artinya lebih dari separoh rumah tangga mempunyai pendapatan lebih rendah dari nilai rata-rata pendapatan rumah tangga.

Seperti halnya pada nilai rata-rata, nilai median pendapatan rumah tangga bervariasi menurut desa. Perbandingan nilai median pendapatan rumah tangga hampir sama dengan perbandingan antar desa pada nilai rata-rata pendapatan. Nilai median pendapatan tertinggi juga terdapat pada rumah tangga di Desa Waha. Median pendapatan rumah tangga di Desa Waha

besarnya hampir dua kali median pendapatan rumah tangga di Kelurahan Wandoka dan hampir tiga kali median pendapatan rumah tangga di Desa Mola Selatan.

Minimum Pendapatan Rumah Tangga

Minimum pendapatan menunjukkan nilai pendapatan terendah dari rumah tangga di lokasi penelitian. Dari Tabel 3.7 diketahui bahwa pendapatan minimum rumah tangga di lokasi penelitian sangat rendah yaitu hanya sebesar Rp. 132 ribu per bulan. Jumlah pendapatan rumah tangga tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk daerah pedesaan tahun 2008 yaitu Rp. 139.065. Setelah ditelusuri ternyata pendapatan rumah tangga tersebut merupakan rumah tangga tunggal karena hanya terdiri dari satu orang ibu yang sudah lanjut usia. Pendapatan yang diperolehnya hanya berasal dari perdagangan sayur-sayuran dan ubi yang dijual satu kali seminggu, sementara untuk makan sehari-hari dikirimkan oleh anaknya.

Pendapatan rumah tangga minimum di ke tiga desa bervariasi. Pendapatan minimum terendah terdapat pada rumah tangga di Kelurahan Wandoka sedangkan tertinggi adalah di Desa Waha. Pendapatan minimum rumah tangga di Desa Waha jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan minimum di Kelurahan Wandoka dan Desa Mola Selatan. Pendapatan minimum rumah tangga di Desa Waha tersebut lebih dari empat kali lipat dari pendapatan minimum rumah tangga di Desa Mola Selatan dan Kelurahan Wandoka. Sementara itu pendapatan minimum rumah tangga di Kelurahan Wandoka dan di Desa Mola Selatan tidak terlalu jauh berbeda. Pendapatan minimum rumah tangga di Kelurahan Wandoka sekaligus merupakan pendapatan minimum untuk ke tiga lokasi Coremap tersebut.

Maksimum Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan maksimum rumah tangga dapat memberikan gambaran mengenai jumlah pendapatan tertinggi yang diperoleh rumah tangga dalam satu bulan. Dari tabel 3.7. diketahui bahwa pendapatan maksimum rumah tangga di lokasi penelitian adalah Rp.7,2 juta per bulan. Pendapatan rumah tangga tertinggi tersebut berasal dari rumah tangga dari Desa Mola Selatan. Kondisi ini mungkin agak bertentangan dengan fakta bahwa pendapatan rata-rata rumah tangga di Desa Mola Selatan merupakan yang terendah dibandingkan dengan dua desa lainnya. Setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata rumah tangga yang mempunyai pendapatan tertinggi tersebut merupakan juragan kapal, karena itu jumlah pendapatan per bulan yang diperolehnya juga tinggi.

Pendapatan maksimum rumah tangga bervariasi antar desa. Seperti sudah diketahui bahwa pendapatan maksimum tertinggi diperoleh oleh rumah tangga dari Desa Mola Selatan. Kemudian disusul oleh rumah tangga dari Desa Waha dan yang paling rendah adalah pendapatan maksimum rumah tangga di Kelurahan Wandoka.

Distribusi Pendapatan Rumah Tangga

Tingkat kesejahteraan rumah tangga juga diindikasikan dari distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan (Tabel 3.9.). Lebih dari separoh rumah tangga berpendapatan kurang dari Rp 1 juta. Apabila dibedakan menurut kelompok pendapatan, maka persentase tertinggi berada pada kelompok pendapatan antara Rp.500 ribu – 999 ribu per bulan, yaitu hampir sepertiga dari seluruh rumah tangga terpilih, sedangkan kelompok pendapatan tertinggi (\geq Rp.3.500.000) hanya dimiliki 6,4 persen rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara

keseluruhan tingkat kesejahteraan rumah tangga di lokasi penelitian masih rendah.

Distribusi rumah tangga yang mempunyai pendapatan pada kelompok terendah bervariasi antar desa. Persentase tertinggi berasal dari Desa Mola Selatan, disusul oleh Kelurahan Wandoka sedangkan di Desa Waha tidak ada satu rumah tanggapun yang mempunyai pendapatan di bawah Rp. 500.000 per bulan.

Perbedaan pendapatan antar desa tersebut semakin jelas apabila pendapatan dibandingkan berdasarkan tingkat pendapatan kurang dari Rp.1 juta per bulan. Sekitar 70 persen rumah tangga di Desa Mola Selatan berpendapatan kurang dari sejuta rupiah, di Kelurahan Wandoka sekitar 50 persen dan di Desa Waha hanya sebesar 2,6 persen. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga di Desa Waha lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya.

Perbandingan distribusi rumah tangga pada kelompok pendapatan tertinggi antar desa juga bervariasi. Dari tabel 3.9. diketahui bahwa Desa Waha memiliki distribusi rumah tangga tertinggi pada kelompok pendapatan lebih dari Rp. 3,5 juta, dibandingkan dengan dua lokasi lainnya yaitu hampir tujuh kali lipat dari Kelurahan Wandoka dan hampir tujuh belas kali lipat dibandingkan dengan Desa Mola Selatan. Apabila hal ini dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan maka dapat disimpulkan bahwa distribusi rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga tertinggi di Desa Waha lebih tinggi dibandingkan dengan Kelurahan Wandoka dan Mola Selatan. Sementara itu rumah tangga di Desa Mola Selatan mempunyai tingkat kesejahteraan terendah.

Tabel 3.9.

Distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Tahun 2009 (Persentase)

No	Kategori pendapatan	Desa			Total
		Mola	Wandoka	Waha	
1	<500.000	30,0	12,7	0	17,9
2	500.000-999.999	43,8	36,4	2,6	32,4
3	1.000.000-1.499.999	13,8	27,3	10,5	17,3
4	1.500.000-1.999.999	7,5	10,9	21,1	11,6
5	2.000.000-2.499.999	2,5	5,5	15,8	6,4
6	2.500.000-2.999.999	1,3	3,6	13,2	4,6
7	3.000.000-3.499.999	0	3,6	15,8	3,5
8	>3.500.000	1,3	3,6	21,1	6,4

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Tingkat kesejahteraan rumah tangga juga terlihat dari pembangunan yang sedang dilakukan di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Hasil observasi menunjukkan bahwa rumah tangga di Desa Waha yang dapat dikatakan mempunyai tingkat kesejahteraan paling tinggi menurut tingkat pendapatan melakukan banyak pembangunan rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah yang dibangun tersebut pada umumnya rumah permanen yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

3.3.2. *Pendapatan Per Kapita*

Pendapatan per kapita seringkali digunakan sebagai indikator kemiskinan dan kesejahteraan. Biasanya pendapatan per kapita didekati dengan pengeluaran per kapita, kemudian dibandingkan dengan garis kemiskinan untuk melihat tingkat kemiskinan. Apabila pendapatan per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan maka rumah tangga tersebut termasuk dalam kategori miskin. Jika terjadi sebaliknya maka rumah tangga

tersebut tersebut tidak termasuk dalam kategori rumah tangga miskin.

Hasil survei memperlihatkan bahwa rata-rata pendapatan per kapita di lokasi penelitian adalah Rp. 317.839 per bulan. Rata-rata pendapatan per kapita tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk daerah perdesaan yaitu Rp. 139.065 per bulan atau secara umum, yaitu Rp. 274.600 per bulan.

Kondisi sebaliknya terjadi apabila menggunakan pendapatan per kapita dengan garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh World Bank, yaitu sebesar dua dolar per hari. Jika nilai kurs dolar yang digunakan adalah Rp. 9.000 per hari, maka jumlah pengeluaran untuk seseorang per bulan menurut ukuran internasional adalah Rp. 540.000 per bulan. Pendapatan per kapita di ke tiga lokasi ini lebih rendah dari garis kemiskinan.

Dengan membandingkan pendapatan per kapita dengan pengeluaran per kapita dari masing-masing rumah tangga, dapat diketahui jumlah rumah tangga miskin di daerah penelitian. Data menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga miskin yang terdapat di lokasi penelitian cukup tinggi yaitu mencakup lebih dari seperempat dari jumlah rumah tangga terpilih.

Apabila dibedakan menurut desa, terlihat adanya variasi tingkat kemiskinan yang sangat besar. Tabel 3.10 menginformasikan bahwa persentase rumah tangga miskin tertinggi terdapat pada Desa Mola Selatan yaitu mencakup hampir separoh dari rumah tangga. Kelurahan Wandoka menduduki posisi kedua dengan persentase penduduk miskin meliputi seperempat dari jumlah rumah tangga terpilih (25,5persen), sementara itu tidak satupun rumah tangga di Desa Waha yang termasuk dalam kategori rumah tangga miskin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah tangga di Desa Waha mempunyai tingkat kesejahteraan

paling baik dibandingkan dengan Desa Mola Selatan dan Kelurahan Wandoka.

Tabel 3.10.

Distribusi Rumah Tangga Miskin di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009 (Persentase)

Tingkat kemiskinan	Desa			Total
	Mola Selatan	Wandoka	Waha	
Miskin	45,5	25,5		28,9
Tidak miskin	55,5	74,5	100,0	71,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Kondisi kemiskinan tersebut tidak berbeda jauh dengan kondisi tingkat kesejahteraan berdasarkan pendapatan rumah tangga yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hal ini agak ironis mengingat dua desa yang mempunyai tingkat kemiskinan tinggi tersebut mempunyai lokasi yang paling dekat dengan kota Wanci yang menjadi ibukota Kabupaten Wakatobi.

3.3.3. Pendapatan Kenelayanan

Pendapatan kenelayanan menggambarkan pendapatan rumah tangga yang berasal dari kegiatan perikanan. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga yang berasal dari kenelayanan di ketiga lokasi penelitian adalah Rp. 856 ribu per bulan. Pendapatan rata-rata dari kenelayanan bervariasi antar desa. Pendapatan tertinggi diperoleh oleh rumah tangga di Desa Waha yaitu sebesar Rp. 1,1 juta per bulan, kemudian disusul oleh rumah tangga dari Desa Mola Selatan

yaitu Rp.794 ribu dan yang terakhir adalah rumah tangga dari Kelurahan Wandoka yaitu Rp. 652 ribu per bulan.

Median pendapatan dari perikanan tangkap adalah Rp. 692 ribu per bulan, artinya terdapat separoh rumah tangga yang mempunyai pendapatan dari perikanan yang lebih rendah atau lebih tinggi dari median tersebut. Median tersebut lebih rendah dari pada pendapatan rata-rata rumah tangga. Kondisi ini menggambarkan bahwa lebih dari separoh rumah tangga mempunyai nilai di atas pendapatan rata-rata.

Pendapatan kenelayanan sangat tergantung pada musim yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu musim gelombang kuat, musim pancaroba dan musim gelombang tenang. Musim gelombang tenang disebut juga dengan musim ikan. Pada musim ini kondisi angin dan ombak dalam keadaan tenang sehingga sangat menguntungkan untuk usaha penangkapan ikan di laut. Pada musim tenang, nelayan biasanya setiap hari melaut dan memperoleh hasil tangkap yang banyak dibandingkan dengan musim lainnya. Frekuensi nelayan untuk pergi mencari ikan di laut menjadi lebih sering dibandingkan dengan kedua musim lainnya, sehingga jumlah hasil tangkap menjadi lebih banyak dan pendapatan yang diperolehpun lebih besar. Dalam satu hari nelayan bisa pergi melaut lebih dari satu kali. Kondisi ini juga ditunjukkan oleh hasil survei, dari tabel 3.11 diketahui bahwa pendapatan rumah tangga dari kenelayanan yang tertinggi diperoleh pada musim tenang yaitu sebesar Rp. 1,1 juta per bulan. Pendapatan yang diperoleh rumah tangga bahkan bisa mencapai Rp. 10 juta per bulan, ditunjukkan oleh nilai maksimum pendapatan rumah tangga dari kenelayanan pada musim tersebut. Sebaliknya, nilai pendapatan minimum rumah tangga dari kenelayanan hanya Rp. 100 ribu per bulan. Pendapatan tersebut dapat dikatakan sangat rendah bagi nelayan pada musim tersebut. Hal ini kemungkinan disebabkan karena perikanan tidak menjadi sumber pendapatan utama bagi rumah

tangga tersebut atau hanya sebagai pekerjaan sampingan atau hasil tangkapannya hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Tabel 3.11.

Statistik pendapatan kenelayanan per bulan per musim di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Statistik	Musim gelombang			Total
	Kuat	Pancaroba	Tenang	
Rata-rata	602.452	817.356	1.147.548	855.785
Median	400.000	600.000	935.000	691.667
Minimum	0	0	100.000	66.667
Maksimum	5.000.000	6.000.000	10.000.000	7.000.000

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Musim pancaroba merupakan peralihan antara musim tenang ke musim gelombang kuat atau sebaliknya. Pada musim ini kondisi iklim tidak stabil. Pada suatu saat kondisi laut tenang sehingga nelayan dapat melaut namun dilain waktu kondisi laut tidak bersahabat sehingga nelayan tidak memungkinkan melaut. Kondisi ini juga berdampak pada hasil tangkapan dan pendapatan yang diperoleh nelayan.

Pada umumnya pendapatan yang diperoleh oleh nelayan pada musim pancaroba lebih rendah, jika dibandingkan dengan pendapatan pada musim gelombang tenang. Hasil survei menunjukkan rata-rata pendapatan rumah tangga dari kenelayanan pada musim pancaroba tiga perempat dari pendapatan pada musim tenang. Pendapatan maksimum yang diperoleh pada musim ini adalah Rp. 6 juta per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan maksimum yang diperoleh

pada musim tenang. Dari nilai minimum yaitu nol dapat diketahui bahwa tidak semua nelayan memperoleh penghasilan pada saat melaut di musim pancaroba. Hasil wawancara dengan beberapa nelayan juga menunjukkan bahwa sebagian nelayan tidak memperoleh keuntungan pada saat melaut pada musim tersebut. Hasil yang mereka peroleh tidak sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaut, bahkan ada diantara mereka yang mengalami kerugian.

Musim gelombang kuat adalah musim dimana angin bertiup sangat kencang dan ombak besar sehingga pada musim ini tidak semua nelayan bisa melaut. Nelayan yang bisa melaut adalah nelayan yang mempunyai armada tangkap dengan teknologi penangkapan ikan yang cukup tinggi sehingga bisa mengatasi kondisi angin dan ombak yang besar.

Rata-rata pendapatan rumah tangga dari kenelayanan pada musim ombak kuat adalah Rp. 602 ribu per bulan. Pendapatan tersebut hanya separoh dari pendapatan pada saat musim tenang dan 0,73 kali pendapatan per bulan pada musim pancaroba. Pendapatan maksimum yang bisa memperoleh adalah sebesar Rp. 5.000.000. Pendapatan maksimum tersebut juga hanya setengah dari pendapatan maksimum yang diperoleh pada musim tenang dan 0,8 kali dari pendapatan maksimum pada musim pancaroba. Bagi rumah tangga yang tidak mempunyai teknologi penangkapan ikan yang memadai biasanya akan memutuskan untuk tidak melaut, seperti yang ditunjukkan oleh nilai minimum nol, karena hasil yang diperoleh tidak menutupi biaya operasi.

Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dari Kenelayanan

Tabel 3.12 menginformasikan bahwa lebih dari separoh rumah tangga nelayan mengelompok pada rumah tangga berpendapatan terendah yaitu kurang dari Rp. 500 ribu per bulan. Hal ini

menunjukkan bahwa secara umum pendapatan rumah tangga dari perikanan tangkap masih sangat rendah. Bahkan jika dikelompokkan pada pendapatan kurang dari 1 juta rupiah diketahui bahwa lebih dari 80 persen rumah rumah tangga nelayan berpendapatan di bawah sejuta rupiah per bulan. Sementara itu rumah tangga nelayan yang berpendapatan tertinggi atau lebih dari Rp 3,5 juta perbulan sangat minim, hanya dimiliki oleh 1,2 persen rumah tangga.

Tabel. 3.12.

Distribusi pendapatan kenelayanan per bulan per musim di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009 (Persentase)

No	Kategori pendapatan	Musim gelombang			Total
		Kuat	Pancaroba	Tenang	
1	<500.000	57,7	36,5	17,3	60,1
2	500.000-999.999	26,0	37,5	33,7	26,6
3	1.000.000-1.499.999	8,7	14,4	25,0	8,1
4	1.500.000-1.999.999	0	1,9	12,5	1,7
5	2.000.000-2.499.999	3,8	3,8	4,8	0,6
6	2.500.000-2.999.999	1,0	1,0	1,9	0,6
7	3.000.000-3.499.999	1,9	2,9	1,9	1,2
8	>3.500.000	1,0	1,9	2,9	1,2

Sumber: *Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)*

Distribusi pendapatan bervariasi antar musim dengan distribusi rumah tangga tertinggi pada kelompok pendapatan terendah (<500.000). Distribusi tertinggi ini diperoleh pada saat gelombang kuat, kemudian disusul disusul pada musim pancaroba dan yang terendah pada saat gelombang tenang. Distribusi rumah tangga yang memiliki pendapatan terendah pada musim gelombang kuat mencakup hampir 60 persen dari

rumah tangga yaitu 1,5 kali pada gelombang pancaroba, dan 3,3 kali pada saat gelombang tenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada umumnya pendapatan rumah tangga dari kenelayanan paling rendah diperoleh pada musim gelombang kuat.

Distribusi rumah tangga berpendapatan tertinggi, lebih besar dari Rp 3,5 juta per bulan juga menunjukkan variasi yang cukup besar antar musim. Persentase tertinggi diperoleh pada musim gelombang tenang, yaitu 2 kali lipat dari musim pancaroba dan 3 kali lipat dari musim gelombang kuat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peluang untuk memperoleh pendapatan besar pada musim gelombang tenang lebih besar dibandingkan musim pancaroba dan musim gelombang kuat.

Distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup signifikan apabila dirinci menurut desa. Tabel 3.13 menginformasikan bahwa persentase tertinggi rumah tangga yang berpendapatan paling rendah terdapat di Kelurahan Wandoka yaitu hampir separoh dari rumah tangga di kelurahan tersebut. Persentase rumah tangga ini 1,2 kali rumah tangga di Desa Mola Selatan dan 2,9 kali rumah tangga di Desa Waha. Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan di Kelurahan Wandoka paling rendah dibandingkan dengan rumah tangga di desa lainnya.

Kondisi serupa juga digambarkan oleh distribusi rumah tangga yang berpendapatan tertinggi. Distribusi tertinggi dimiliki oleh rumah tangga di Desa Waha yaitu sebesar 4 persen, dua kali lipat dibandingkan dengan distribusi rumah tangga di Desa Mola Selatan. Sedangkan di Kelurahan Wandoka tidak ada rumah tangga nelayan yang berpendapatan lebih besar dari Rp. 3,5 juta per bulan.

Tabel. 3.13.
Distribusi pendapatan kenelayanan per bulan menurut desa di Desa
Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten
Wakatobi, Tahun 2009 (Persentase)

No	Kategori pendapatan	Desa			Total
		Mola	Wandoka	Waha	
1	<500.000	38,8	45,8	16,1	60,1
2	500.000-999.999	51,0	33,3	41,9	26,6
3	1.000.000-1.499.999	4,1	16,7	25,8	8,1
4	1.500.000-1.999.999	2,0	0	6,5	1,7
5	2.000.000-2.499.999	0	0	3,2	0,6
6	2.500.000-2.999.999	2,0	0	0	0,6
7	3.000.000-3.499.999	0	4,2	3,2	1,2
8	>3.500.000	2,0	0	3,2	1,2

Sumber: Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang,
COREMAP-LIPI (2009)

Perubahan Pendapatan Kenelayanan

Bagian ini membahas perubahan pendapatan dan jumlah hasil tangkapan nelayan sebelum dan sesudah masuknya program Coremap ke Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Informasi perubahan pendapatan kenelayanan diperlukan untuk melihat keberhasilan program Coremap dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pelestarian terumbu karang yang menjadi tempat tumbuh kembangnya ikan. Peningkatan jumlah ikan pada ekosistem terumbu karang diharapkan berdampak pada meningkatnya jumlah atau volume ikan yang ditangkap oleh nelayan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan pada akhirnya berujung pada peningkatan kesejahteraan nelayan.

Untuk mengetahui perubahan pendapatan masyarakat dilakukan survei terhadap rumah tangga yang mempunyai kegiatan kenelayanan. Rumah tangga yang mempunyai kegiatan

kenelayanan adalah rumah tangga yang mempunyai pendapatan bersumber dari perikanan, terutama perikanan tangkap.

Tabel 3.14 menggambarkan bahwa mayoritas rumah tangga (44,2 persen) mengaku bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil tangkap tidak mengalami perubahan (sama saja) sebelum maupun sesudah dilaksanakan kegiatan Coremap. Meskipun demikian, persentase rumah tangga yang mengaku mengalami kenaikan pendapatan juga cukup tinggi, tidak jauh berbeda dengan persentase rumah tangga yang merasa tidak mengalami peningkatan (42,3 persen). Hanya sebagian kecil dari rumah tangga nelayan yang mengaku mengalami penurunan pendapatan dari hasil tangkap.

Tabel. 3.14.

Distribusi persentase perubahan pendapatan dari kenelayanan dan hasil tangkap sebelum dan sesudah pelaksanaan Coremap di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

	N (jumlah RT)	Persentase
Pendapatan dari hasil tangkap		
Mengalami kenaikan	44	42,3
Sama saja	46	44,2
Mengalami penurunan	14	13,5
Total	104	100,0
Hasil tangkap		
Mengalami kenaikan	41	39,4
Sama saja	48	46,2
Mengalami penurunan	15	14,4
Total	104	100,0

Sumber: Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)

Respon yang hampir sama juga diberikan oleh rumah tangga nelayan ketika ditanyakan mengenai perubahan hasil tangkapan yang diperoleh selama setahun terakhir dibandingkan dengan

sebelum adanya program Coremap di lokasi tersebut. Sebagian besar responden mengaku hasil tangkapan yang diperoleh sebelum dan sesudah adanya Coremap tidak mengalami perubahan. Namun persentase responden yang mengaku mengalami kenaikan hasil tangkap juga cukup tinggi yaitu mencapai hampir 40 persen, tidak jauh berbeda dengan persentase responden yang merasa tidak mengalami perubahan hasil tangkap. Sedangkan persentase responden yang mengalami penurunan hasil tangkap tidak lebih dari 15 persen.

Dari hasil survei diketahui bahwa mayoritas responden tidak merasa adanya perbedaan hasil tangkap sebelum dan sesudah adanya kegiatan Coremap. Namun perlu dicatat bahwa persentase responden yang merasa adanya kenaikan hasil tangkap tidak berbeda secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian responden merasakan adanya manfaat pelestarian terumbu karang dari Coremap yang berdampak pada meningkatnya jumlah ikan. Kondisi ini dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan nelayan.

Meningkatnya hasil tangkap nelayan juga tercermin dari hasil wawancara dengan CF dan MD di lokasi Coremap. Kegiatan Coremap meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan bom atau racun. Berkurangnya penggunaan bom dan racun berdampak pada peningkatan jumlah ikan yang terdapat di laut. Akibatnya nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh untuk menangkap ikan. Sebagian nelayan menangkap ikan sampai ke Tomia sebelum adanya Coremap. Jumlah hasil tangkap yang diperolehpun menjadi meningkat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh salah seorang nelayan tuna. Sebelum adanya Coremap, nelayan ini harus melaut pada malam hari karena wilayah tangkapnya cukup jauh. Kualitas hasil tangkapan yang ia peroleh juga kurang baik, jauhnya wilayah penangkapan ikan menyebabkan ikan harus disimpan dalam waktu yang cukup

lama, sehingga menurunkan kualitas. Setelah adanya Coremap, nelayan tersebut melaut siang hari, karena daerah penangkapan ikan tuna tidak jauh. Kualitas hasil tangkapan yang diperoleh juga meningkat karena tidak melalui penyimpanan yang lama. Dengan meningkatnya kualitas ikan, harga jualnya pun menjadi meningkat, akibatnya pendapatan yang diperoleh juga meningkat.

Penelitian ini juga menanyakan pada responden yang merupakan anggota rumah tangga nelayan tentang dampak dari kenaikan hasil tangkap terhadap pendapatan nelayan. Idealnya peningkatan hasil tangkap juga meningkatkan pendapatan yang diterima rumah tangga, namun kondisi ini tidak akan berlaku apabila harga ikan jatuh atau mengalami penurunan.

Responden yang mengaku hasil tangkapnya naik, hampir semua menginformasikan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga dari kenaikan hasil tangkap (Tabel 3.15). Kondisi ini menunjukkan salah satu keberhasilan dari program-program perlindungan terumbu karang yang telah dilakukan oleh Coremap dan lembaga lainnya di lokasi ini.

Beberapa kegiatan Coremap yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan rumah tangga kenelayanan diantaranya adalah diadakannya kegiatan patroli laut, pembentukan DPL, pemberian alat tangkap (jaring), dan pembangunan sarana penunjang (pembangunan TPI, dermaga, dll). Kegiatan patroli laut merupakan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan terumbu karang. Kegiatan patroli ini biasanya dilakukan oleh anggota kelompok masyarakat pengawasan (pokmaswas) yang ada di tiap desa. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi terumbu karang dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya laut ini, terutama kegiatan yang merusak karang. Diharapkan dengan adanya kegiatan patroli laut ini, kegiatan-kegiatan yang dapat merusak terumbu karang dapat berkurang, sehingga terumbu karang dapat tumbuh dengan baik. Apabila terumbu karang di suatu wilayah

laut dalam kondisi yang baik, maka dapat dipastikan bahwa jumlah ikan yang terdapat di daerah tersebut juga akan meningkat.

Tabel 3.15.

Distribusi persentase rumah tangga tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan hasil tangkap di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Pertanyaan	Jumlah RT(N)	Persentase
Apakah kenaikan hasil tangkapan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan rumah tangga?		
Ya	37	90,2
Tidak	4	9,8
Total	41	100,0
Jika mengalami kenaikan apakah kenaikan tersebut karena pengaruh dari kegiatan Coremap berikut?		
Kegiatan patroli laut		
Ya	33	80,5
Tidak	8	19,5
Total	41	100,0
DPL		
Ya	32	78,0
Tidak	9	22,0
Total	41	100,0
Alat tangkap (jaring keramba)		
Ya	3	7,3
Tidak	38	92,7
Total	41	100,0
Sarana penunjang (TPI, Dermaga, dll)		
Ya	2	4,9
Tidak	39	95,1
Total	41	100,0

Sumber: Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP- LIPI (2009)

Hasil survei menunjukkan bahwa hampir semua responden mengaku bahwa peningkatan jumlah hasil tangkapan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga

yang mereka rasakan adalah berkat adanya kegiatan patroli laut tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa patroli laut membawa dampak yang positif terhadap peningkatan hasil tangkapan.

Selain kegiatan patroli laut, mayoritas responden berpendapat bahwa kenaikan hasil tangkap juga merupakan dampak dari keberadaan Daerah Perlindungan Laut (DPL). DPL merupakan kawasan tertentu yang diperuntukkan bagi perlindungan sumber daya hayati dan non hayati laut, karena itu pengelolaannya memerlukan ketentuan khusus. Daerah ini diperuntukkan sebagai tempat bertelur dan berkembang biaknya ikan dan biota laut, karena itu zona inti tidak boleh dimanfaatkan, namun nelayan masih diizinkan memancing di bagian pinggir, tapi tidak boleh merusak karang, seperti pengeboman, pembiusan dan penambangan batu karang

Responden mengaku bahwa kenaikan pendapatan rumah tangga sebagai dampak kenaikan hasil tangkap, merupakan pengaruh dari kegiatan Coremap berupa pemberian bantuan alat tangkap, seperti jaring atau keramba, persentasenya sangat sedikit (7,3 persen). Hal ini wajar karena minimnya bantuan jaring dan keramba dari Coremap. Salah satu bantuan keramba jaring apung diberikan pada salah seorang nelayan di Desa Mola Selatan. Namun jumlah jaring atau keramba yang diberikan tersebut sangat terbatas.

Hal yang sama juga terjadi pada saat ditanyakan tentang pengaruh sarana penunjang berupa TPI atau Dermaga terhadap peningkatan hasil tangkapan. Hasil survei menginformasikan hanya 2 responden yang mengaku bahwa kenaikan hasil tangkap yang disebabkan oleh pengaruh kegiatan Coremap melalui pemberian sarana penunjang. Minimnya jumlah responden tersebut disebabkan karena Coremap memang belum memberikan bantuan berupa pembangunan sarana-sarana

penunjang seperti TPI atau dermaga di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha.

3.3.4. Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas

Tujuan Coremap adalah melestarikan terumbu karang dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Coremap membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di desa/kelurahan yang bertujuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif (UEP) yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (pokmas) di lokasi Coremap. Kegiatan UEP direalisasikan dalam bentuk dana bergulir atau seed fund yang didistribusikan pada pokmas. Seed fund diperuntukkan sebagai tambahan modal anggota kelompok agar dapat meningkatkan usaha. Dengan demikian diharapkan melalui UEP Coremap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang menjadi anggota pokmas di lokasi Coremap.

Keberhasilan UEP dapat diukur melalui peningkatan pendapatan atau kesejahteraan penerimanya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan pendapatan rumah tangga yang menjadi anggota pokmas yang mendapat bantuan UEP dengan rumah tangga non pokmas yang tidak mendapat UEP. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga penerima UEP adalah Rp. 1,5 juta per bulan, lebih tinggi 13 persen dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak tergabung dalam pokmas (Tabel 3.16). Tingginya pendapatan rumah tangga anggota pokmas dibandingkan non pokmas tersebut juga berlaku untuk nilai-nilai statistik lainnya, yaitu median pendapatan, pendapatan minimum dan pendapatan maksimum. Perbedaan yang sangat signifikan terlihat pada pendapatan minimum dimana pendapatan minimum dari rumah tangga anggota pokmas yang menerima UEP 2,4 kali lebih besar daripada pendapatan minimum rumah tangga non pokmas yang tidak memperoleh UEP.

Tabel 3.16.
Statistik pendapatan rumah tangga anggota pokmas
dan non pokmas di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha,
Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

Statistik	Kategori rumah tangga	
	Pokmas	Non Pomas
Rata-rata	1.507.887	1.329.653
Median	1.016.667	900.000
Minimum	316.667	132.000
Maksimum	7.200.000	5.140.000

Sumber: Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)

Tabel 3.17 menginformasikan lebih dari separoh rumah tangga anggota pokmas penerima dana UEP mempunyai pendapatan di atas satu juta rupiah per bulan, sedangkan mayoritas rumah tangga non pomas yang tidak menerima dana UEP mempunyai pendapatan di bawah satu juta rupiah per bulan. Kondisi ini juga terjadi pada kelompok pendapatan terendah yaitu di bawah RP. 500 ribu rupiah per bulan. Sekitar seperlima (20 persen) dari rumah tangga non pokmas yang tidak mendapat dana UEP berada pada kelompok pendapatan terendah tersebut, sedangkan rumah tangga anggota pokmas penerima dana UEP hanya kurang dari 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sangat sedikit rumah tangga penerima UEP yang tergolong berpendapatan paling rendah atau miskin.

Sementara itu, distribusi tertinggi rumah tangga anggota pokmas penerima UEP berada pada kelompok berpendapatan antara Rp. 1 juta - Rp.1, 499 juta per bulan. Sedangkan distribusi tertinggi rumah tangga non pokmas yang tidak menerima UEP berada pada kelompok berpendapatan lebih rendah, yaitu RP. 500 ribu - Rp. 999 ribu per bulan. Distribusi rumah tangga yang berada pada kelompok pendapatan tertinggi yaitu di atas Rp. 3,5 juta per bulan menunjukkan perbedaan yang signifikan, persentase rumah tangga anggota pokmas penerima UEP jauh lebih tinggi,

hampir tiga kali lipat dari rumah tangga non pokmas yang tidak menerima dana UEP.

Tabel. 3.17.

Distribusi persentase rumah tangga anggota pokmas penerima UEP dan non pokmas bukan penerima UEP di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha, Kabupaten Wakatobi, Tahun 2009

No	Kategori pendapatan	Jenis	
		UEP	Non UEP
1	<500.000	8,8	20,1
2	500.000-999.999	29,4	33,1
3	1.000.000-1.499.999	32,4	13,7
4	1.500.000-1.999.999	8,8	12,2
5	2.000.000-2.499.999	2,9	7,2
6	2.500.000-2.999.999	5,9	4,3
7	3.000.000-3.499.999	8,8	2,2
8	>3.500.000	2,9	7,2

Sumber: Data Primer BME Sosial Ekonomi Terumbu Karang, COREMAP-LIPI (2009)

Namun kondisi ini belum dapat mengindikasikan keberhasilan Coremap dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga anggota pokmas penerima dana UEP. Hal ini dikarenakan anggota pokmas penerima dana UEP kebanyakan adalah anggota masyarakat yang telah mempunyai usaha dan tokoh-tokoh masyarakat dengan kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dari rumah tangga non pokmas. Di samping itu, pendapatan rumah tangga anggota pokmas penerima dana UEP ini merupakan total dari pendapatan rumah tangga baik yang bersumber dari dana UEP maupun dana lainnya. Dengan demikian tidak dapat diklaim sebagai hasil dana UEP atau seed fund.

Dalam pelaksanaan UEP beberapa anggota pokmas telah mengalami keberhasilan dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hal ini dijelaskan ibu rumah tangga yang menerima bantuan seed fund dari UEP Coremap, seperti dikemukakan dalam box 1 dan 2.

Box 1

Ibu A adalah seorang penjual ikan (papalele). Sebelum menjadi papalele, beliau bekerja sebagai buruh penjual ikan pada seorang juragan ikan dengan upah sebesar Rp. 30.000 per hari. Kemudian ibu A diberi tahu oleh Ketua LKM di desanya bahwa ada *seed fund* dari Coremap yang dapat memberikan pinjaman modal pada anggotanya. Ibu A mendapat pinjaman dari dana UEP tersebut sebesar Rp. 1.000.000. Dana ini dijadikan modal untuk membeli ikan dari nelayan dan kemudian menjualnya ke pasar di Kota Wanci yang relatif dekat dengan rumahnya. Setiap hari ibu A bisa memperoleh keuntungan antara Rp. 50.000-Rp. 200.000, jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang ibu A peroleh ketika masih menjadi buruh penjual ikan.

Box 2

Ibu B adalah seorang ketua pokmas jender. Sebelumnya ia hanya ibu rumah tangga dan mempunyai kegiatan dengan ibu-ibu yang menjadi anggota pokmas jender yaitu membuat dendeng, namun usahanya ini tidak berjalan lancar. Kemudian ia mengajukan pinjaman dana Seed Fund dan mendapat pinjaman sebesar Rp. 1.000.000. Dana tersebut dijadikan modal untuk usaha menjual solar. Setiap 2 hari sekali ia membeli solar sebanyak 10 dirijen (1 dirijen = 20 liter) yang dibeli dengan harga Rp. 5.000-5.500 per liter. Solar tersebut dijual dengan harga Rp. 6.000 per liter. Sehingga dalam 1 dirijen ia memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000 –Rp.20.000 per dirijen. Apabila dalam 2 hari terjual 10 dirijen maka keuntungan yang diterimanya mencapai Rp. 100.000-200.000. Ibu B mengaku sangat terbantu dengan adanya pinjaman tersebut. Dari hasil penjualan solar tersebut ia bisa membantu suami untuk membeli mesin kapal yang sebelumnya hanya menggunakan dayung. Dengan mesin tersebut suaminya dapat menangkap ikan ke laut lepas. Selain dijual, solar juga digunakan untuk kebutuhan suaminya melaut. Dengan menggunakan kapal motor tersebut, suaminya yang tadinya hanya dapat melaut di daerah sekitar pantai, sekarang bisa menjangkau wilayah yang cukup jauh. Dari hasil penjualan solar dan hasil penangkapan ikan, akhirnya ibu B bersama suaminya bisa membangun sebuah rumah.

Meskipun data pendapatan dari hasil survei secara umum menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga penerima UEP lebih tinggi dari rumah tangga bukan penerima UEP, namun hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga penerima UEP berhasil dalam usahanya. Keberhasilan usaha penerima UEP dapat diindikasikan oleh lancarnya pengembalian pinjaman UEP tersebut. Sebagian peminjam dana UEP, menurut beberapa pengurus LKM di lokasi penelitian, tidak dapat mengembalikan pinjaman pada waktunya atau menunggak selama beberapa bulan, bahkan ada anggota pokmas yang tidak mau mengembalikan karena alasan tertentu. Penunggakan pembayaran pinjaman dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu usaha tidak berhasil (gagal), usaha belum menghasilkan dan memang tidak mau mengembalikan.

Contoh kasus usaha yang tidak berhasil adalah yang terjadi di Desa Mola Selatan. Seorang penerima UEP di desa ini tidak dapat mengembalikan dana UEP yang dipinjamnya. Hal ini terjadi karena anggota tersebut tidak menggunakan dana UEP yang dipinjamkan untuk usaha seperti yang diusulkan pada saat mengajukan pinjaman. Dana yang diterima digunakan untuk membayar hutang pada rentenir. Rentenir memang cukup banyak terdapat di desa-desa di Wakatobi, terutama di Desa Mola Selatan. Rentenir-rentenir tersebut memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak mampu mengembalikan. Anggota pokmas tersebut tidak bisa mengembalikan pinjaman dana UEP, maka pengurus LKM terpaksa menyita barang jaminan yang digunakannya sebagai agunan untuk memperoleh dana, yaitu berupa rumah yang ditempati. Akibatnya, anggota dan keluarganya terpaksa pindah dari rumah tersebut. Meskipun demikian pengurus LKM masih memberikan kesempatan pada anggota UEP ini untuk menebus rumahnya kembali.

Sistem pinjaman dari dana UEP Coremap berbeda dengan rentenir. Dana UEP memang dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha, sehingga bunga yang dibebankan kepada peminjam sangat kecil. Bunga besarnya disepakati dalam musyawarah masyarakat setempat. Rata-rata bunga pinjaman dari dana UEP hanya sekitar 2,5 persen. Penggunaan bunga dilakukan secara transparan sehingga setiap anggota masyarakat mengetahui kemana bunga tersebut mengalir. Kecilnya bunga pinjaman dana UEP menyebabkan banyak masyarakat yang berminat untuk mengajukan pinjaman sehingga mereka terpaksa harus antri.

Alasan lain dari sebagian peminjam yang menunggak dalam mengembalikan dana UEP adalah karena usaha yang dilakukan belum menghasilkan. Sebagai contoh, seorang peminjam di Kelurahan Wandoka menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha peternakan itik. Sampai saat kajian ini dilakukan, peternakan itik yang dikelolanya belum menghasilkan, sehingga anggota ini belum bisa membayar angsuran bulanan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sebagian peminjam dana UEP menunggak pengembalian dana karena memang tidak mau mengembalikan. Keadaan ini terutama terjadi di Desa Waha. Beberapa warga yang meminjam dana UEP tahun 2007 tidak mau mengembalikan pinjaman, karena terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu yang menyuarakan bahwa dana UEP merupakan uang rakyat yang tidak perlu dikembalikan. Akibatnya, para peminjam yang terprovokasi tersebut belum mengembalikan dana UEP sampai dengan kajian ini dilakukan bulan Oktober 2009.

Sebagian anggota pokmas di Kelurahan Wandoka masih menunggak pengembalian dana UEP, karena melihat peminjam yang lainnya juga belum mengembalikan. Penunggakan bukan karena usaha yang dilakukan tidak berhasil, bukan karena tidak mau mengembalikan dan tidak pula karena tidak mempunyai

kemampuan untuk membayar. Mereka mengatakan baru akan membayar kalau peminjam lain juga membayar. Para peminjam ini menghendaki agar LKM dan para anggota pokmas yang menunggak duduk bersama untuk mendiskusikan masalah tersebut. Mereka akan mengembalikan pinjaman kalau sudah ada ketegasan dari pihak LKM yang dapat memaksa semua peminjam untuk mengembalikan dana UEP sesuai dengan perjanjian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengembalikan dana masih rendah. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penyadaran akan pentingnya pengembalian dana UEP yang akan digulirkan pada anggota masyarakat lain yang memerlukan. Disamping itu juga diperlukan ketegasan dari pengurus LKM untuk melakukan penagihan kepada anggota yang mendapatkan dana, kalau perlu dengan melibatkan aparat desa.

Uraian di atas menggambarkan bahwa berdasarkan indikator pendapatan rumah tangga dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di lokasi penelitian masih cukup rendah. Hal ini diindikasikan dari tingkat pendapatan rumah tangga yang masih rendah dan masih tingginya angka kemiskinan, yaitu mencapai lebih dari seperempat dari keseluruhan rumah tangga terpilih. Coremap yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat mulai merasakan manfaat dari kegiatan yang dilakukan Coremap untuk pelestarian terumbu karang, seperti pembentukan DPL dan patroli laut. Kegiatan-kegiatan tersebut dianggap telah meningkatkan ketersediaan stok ikan di laut. Meningkatkan ketersediaan ikan di laut membawa pengaruh positif terhadap meningkatnya hasil tangkapan dan selanjutnya meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan. Pemberian bantuan langsung berupa pinjaman dana UEP terbukti cenderung memberi manfaat

terhadap pengembangan usaha dan kesejahteraan penerima bantuan tersebut, meskipun sebagian belum dapat merasakan manfaat dengan berbagai alasan. Sebagian penerima dana UEP tidak mau mengembalikan dana tersebut. Penyadaran masyarakat akan pentingnya pengembalian dana UEP karena itu diperlukan, agar dana tersebut dapat digulirkan pada anggota masyarakat yang masih memerlukan bantuan dana di lokasi Coremap ini.

BAB IV

PENUTUP

Bab penutup ini merupakan rangkuman hasil *Benefit Monitoring and Evaluation* atau BME II Program Penyelamatan Terumbu Karang atau Coremap di Kabupaten Wakatobi, khususnya Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha (desa induk sebelum pemekaran). Monitoring difokuskan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang, pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Coremap, serta manfaat Coremap dari aspek sosial dan ekonomi. Hasil BME II juga menggambarkan pelaksanaan kegiatan Coremap, capaian dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.

4.1. KESIMPULAN

Pelaksanaan Coremap di Kabupaten Wakatobi, khususnya Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha (desa induk sebelum pemekaran) menurut hasil BME II belum optimal, meskipun telah mengalami perkembangan. Gambaran ini diindikasikan dari pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya terumbu karang dan sekitarnya, pengetahuan dan partisipasi dalam kegiatan Coremap, dan manfaat sosial dan ekonomi kegiatan Coremap di ke tiga lokasi tersebut.

Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Terumbu Karang dan Penggunaan Bahan/alat yang Merusak

Pengetahuan masyarakat tentang terumbu karang mencakup fungsi ekologi dan manfaat sosial ekonomi. Hasil kajian menginformasikan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui fungsi ekologi terumbu karang. Pengetahuan bervariasi menurut jenis fungsi dan lokasi. Hampir semua responden mengetahui terumbu karang sebagai rumah ikan, tempat tumbuh dan berkembang biak, serta melindungi keragaman hayati laut. Pengetahuan tentang fungsi sebagai pelindung pantai dari ombak dan badai persentasenya lebih rendah, tetapi masih besar, lebih dari tiga per empat total responden.

Pengetahuan juga bervariasi menurut lokasi dengan persentase pengetahuan responden tertinggi terdapat di Desa Waha dan terendah di Desa Mola Selatan. Keadaan ini dapat dipahami karena Desa Waha langsung berbatasan dengan laut lepas yang paling merasakan resiko yang tinggi dari proses alam yang terjadi di laut, seperti ombak dan badai pada musim gelombang kuat. Sebaliknya, Desa Mola Selatan mempunyai resiko yang lebih rendah daripada di Waha, karena itu sebagian masyarakat di lokasi ini kurang memahami fungsi karang, terutama sebagai pelindung pantai. Selain itu, Desa Mola Selatan tidak mempunyai wilayah pantai, sebagian wilayahnya berada di atas laut dan sebagian lagi di daratan yang merupakan hasil reklamasi dengan fondasi berupa batu karang.

Sedangkan pengetahuan responden tentang manfaat sosial ekonomi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pengetahuan tentang fungsi terumbu karang. Pengetahuan bervariasi menurut jenis manfaat. Terumbu karang bermanfaat sebagai sumber bahan baku (rumah, hiasan dan obat-obatan) hanya diketahui sebagian kecil masyarakat, diwakili oleh kurang dari tiga per empat responden. Manfaat sebagai sumber

pendapatan diketahui kurang dari dua per tiga responden, dan sebagai tempat wisata diketahui kurang dari separoh responden.

Pengetahuan masyarakat tentang manfaat terumbu karang juga bervariasi menurut lokasi. Terumbu karang bermanfaat sebagai sumber pendapatan, persentase yang paling tinggi berasal dari Desa Mola Selatan. Keadaan ini berkaitan erat dengan pekerjaan utama hampir semua penduduknya, yaitu sebagai nelayan tangkap di sekitar kawasan karang. Sebaliknya, persentase terendah berasal dari Kelurahan Wandoka, juga berhubungan dengan pekerjaan penduduk yang kebanyakan bukan nelayan. Manfaat sebagai bahan dasar (rumah, hiasan dan obat-obatan), persentase tertinggi berasal dari Desa Mola Selatan, sebagian besar rumah warga fondasi rumahnya dibangun dari batu karang. Sebaliknya, persentase pengetahuan penduduk paling rendah dari Desa Waha, berkaitan dengan sebagian penduduknya adalah petani dan permukiman penduduk berada di daratan yang umumnya tidak menggunakan batu karang sebagai bahan bangunan rumah.

Lebih dari separoh responden menyatakan kondisi terumbu karang masih baik di ke tiga lokasi. Namun kondisi tersebut bervariasi menurut lokasi dengan persentase tertinggi terdapat di Kelurahan Wandoka, lebih dari tiga per empat total responden. Sebaliknya terendah di Mola Selatan, kurang dari separoh responden. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi Karang Kapota yang terletak di dekat Desa Mola Selatan yang telah mengalami kerusakan karena dulunya penggunaan alat/bahan tangkap yang illegal, seperti bom dan bius.

Hasil BME II juga mengungkapkan sikap masyarakat yang cukup menggembarakan tentang pemanfaatan terumbu karang, khususnya pengambilan karang. Sebagian besar responden tidak setuju dan hanya sebagian kecil responden yang setuju pengambilan terumbu karang. Sikap responden bervariasi antar lokasi, hampir semua responden di Desa Waha dan Kelurahan

Wandoka tidak setuju dan responden yang setuju kebanyakan berasal dari Desa Mola Selatan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan sebagian kecil penduduk Mola yang mengambil karang baik untuk kebutuhan sendiri maupun dijual.

Sikap juga dilihat dari pendapat tentang larangan pengambilan karang. Sebagian besar responden, sekitar sepertiga, setuju dengan larangan tersebut. Sikap responden tersebut bervariasi antar lokasi. Sebagian besar responden di Desa Mola Selatan setuju dengan larangan, tetapi sikap ini kurang konsisten karena kebanyakan juga setuju dengan penduduk yang mengambil batu karang. Ketidak konsistenan ini lebih dikarenakan kepedulian terhadap sesama warga mengingat pengambilan karang merupakan mata pencaharian atau sumber pendapatan sebagian kecil penduduk.

Hasil BME juga mengindikasikan bahwa masyarakat juga mengambil karang, baik dalam kondisi hidup atau mati. Pengambilan karang hidup persentasenya relatif kecil, tetapi terjadi peningkatan antara sebelum pelaksanaan Coremap dan dalam satu tahun terakhir. Peningkatan terutama terjadi di Desa Mola Selatan, diikuti oleh responden di Desa Waha, meskipun hanya satu orang. Sebaliknya di Wandoka, sebelum ada Coremap terdapat seorang responden yang mengambil karang dan responden tersebut telah berhenti melakukan kegiatan ini dalam satu tahun terakhir.

Pengambilan karang dalam satu tahun terakhir, terdiri dari 22 orang (21 orang dari Mola Selatan) mengambil karang hidup dan 29 orang (28 orang dari Mola) mengambil karang mati. Persentase tertinggi digunakan untuk keperluan sendiri, sebanyak 59 persen untuk karang hidup dan 65 persen untuk karang mati. Pengambilan karang terutama dilakukan di Desa Mola Selatan, sedangkan di Desa Waha hanya satu orang dan tidak ada di Wandoka. Sedangkan untuk keperluan komersil hanya terdapat

di Mola Selatan, yaitu sebanyak 18 persen untuk karang hidup dan 6.9 persen untuk karang mati.

Hasil BME II juga menginformasikan pengetahuan masyarakat yang beragam tentang alat yang merusak dan tidak merusak terumbu karang, cukup baik di Desa Mola Selatan dan masih rancu di Keluarahan Wandoka dan Desa Waha. Keadaan ini diindikasikan oleh belum bisanya responden di kedua lokasi tersebut membedakan antara bahan/alat yang merusak dan ramah lingkungan.

Bom menurut responden di ketiga lokasi adalah alat tangkap yang paling merusak karang, diikuti oleh sianida/racun, trawl, bubu, tombak/panah dan bagan tancap. Hampir semua responden mengatakan bom dan sebagian besar responden menjawab bus merupakan bahan/alat tangkap yang merusak dan dilarang pemerintah. Tetapi, masih terdapat beberapa responden di Mola Selatan yang menyatakan bahwa penggunaan bom tidak merusak karang. Sebagian kecil responden di semua lokasi mengungkapkan bus juga tidak merusak karang. Meskipun persentase responden tersebut relatif kecil, keadaan ini perlu mendapat perhatian. Sedangkan *trawl* dan bagan tancap dianggap responden sebagai alat tangkap yang merusak, tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap pengelolaan terumbu karang di semua lokasi karena nelayan Wakatobi, termasuk di lokasi-lokasi ini menggunakan alat tangkap tersebut.

Penggunaan bahan dan alat yang merusak karang mengalami penurunan antara sebelum adanya Coremap dan dalam satu tahun terakhir. Penggunaan bom dalam menangkap ikan sudah hampir tidak ada lagi di semua lokasi terutama setelah adanya Coremap. Kondisi serupa juga terjadi pada penggunaan bus sianida di semua lokasi, terutama Desa Mola Selatan dan tuba, khususnya di Desa Waha, turun secara signifikan pada periode tersebut. Penurunan penggunaan bom dan bus secara signifikan ini terutama diketahui dari hasil kajian dengan pendekatan

kualitatif, sedangkan hasil survei menginformasikan penurunan yang kurang mencolok.

Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Coremap

Hasil BME II menggambarkan sebagian besar masyarakat mengetahui keberadaan Coremap, tetapi pengetahuan masyarakat tentang Coremap dan partisipasi dalam kegiatan program ini masih terbatas. Keadaan ini diindikasikan dari rendahnya persentase masyarakat yang mengetahui dan terlibat dalam kegiatan pengelola Coremap di tingkat desa dan di tingkat masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat, khususnya pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) fisik desa dan usaha ekonomi produktif (UEP) atau mata pencaharian alternatif (MPA).

Pengelola Coremap Tingkat Desa

Pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK) masih sangat terbatas, diindikasikan dari kurang dari sepertiga responden mengetahui keberadaan lembaga ini. Dari responden yang tahu, hanya seperlima yang berpartisipasi dalam kegiatan LPSTK. Padahal, LPSTK adalah lembaga inti yang melaksanakan kegiatan Coremap di tingkat desa, termasuk menyusun rencana pengelolaan terumbu karang (RPTK), mengembangkan daerah perlindungan laut (DPL), membangun sarpras fisik desa, mensosialisasikan kegiatan Coremap, membimbing dan memonitor kegiatan program. Keadaan ini bervariasi menurut jenis kegiatan dan lokasi Coremap, dengan pengetahuan dan partisipasi tertinggi terdapat di Desa Waha dan sebaliknya terendah di Desa Mola Selatan, sedangkan di Kelurahan Wandoka berada diantara ke dua lokasi tersebut.

Kondisi yang lebih memprihatinkan dialami oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hampir 90 persen responden tidak mengetahui pembentukan lembaga ini dan sebagian besar dari mereka tidak berpartisipasi dalam kegiatan LKM. Padahal, LKM juga merupakan lembaga inti yang mengelola dana bergulir atau *seed fund* untuk kegiatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kelompok masyarakat (pokmas) dan kelompok jender. Hanya sekitar sepertiga responden yang mengetahui kegiatan LKM ini dan dari responden tersebut hanya sekitar sepertiga yang berpartisipasi. Pengetahuan dan partisipasi dalam kegiatan pendampingan dan monitoring LKM juga sangat minim.

Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan LPSTK dan LKM berkaitan erat dengan tiga alasan. Alasan pertama adalah minimnya sosialisasi tentang pembentukan dan kegiatan LPSTK dan LKM, karena sosialisasi yang dilakukan yaitu pada awal pelaksanaan Coremap lebih menekankan pada pentingnya pelestarian terumbu karang. Sosialisasi awal di Desa Mola Selatan diasosiasikan negatif oleh sebagian masyarakat, khususnya nelayan, sebagai larangan menangkap ikan di kawasan karang. Anggapan ini berkaitan erat dengan adanya program konservasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga di wilayah perairan laut ini, yang melarang kegiatan nelayan di lokasi konservasi.

Alasan kedua adalah terbatasnya kegiatan kedua lembaga pengelola tersebut. Kegiatan LPSTK dan LKM terbatas pada even-even tertentu saja setelah pengucuran dana dari PMU Coremap, seperti pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) fisik desa untuk LPSTK dan pembagian dana bergulir untuk kegiatan mata pencaharian alternatif atau usaha ekonomi produktif (UEP) untuk LKM.

Alasan ketiga adalah terbatasnya kegiatan pengurus LPSTK dan LKM dalam menjalankan tugasnya. Keadaan ini diketahui dari minimnya kegiatan pengelola/pengurus kedua lembaga tersebut

dalam melakukan pembimbingan dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan pokmas, kelompok jender dan pokmas pengawasan/konservasi di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Padahal, pembimbingan dan monitoring kegiatan masih sangat diperlukan oleh anggota pokmas di ketiga lokasi tersebut.

Pengelola Coremap Tingkat Masyarakat

Pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelola Coremap tingkat masyarakat (pokmas, kelompok jender dan pokmas pengawas) juga masih sangat terbatas. Hanya sekitar sepertiga responden mengetahui pembentukan dan kegiatan pokmas. Pengetahuan bervariasi menurut jenis pokmas dengan persentase tertinggi terdapat pada kegiatan pokmas UEP dan sebaliknya persentase terendah pada kegiatan pokmas pengawasan terumbu karang. Rendahnya pengetahuan masyarakat ini berkaitan erat dengan kurangnya sosialisasi tentang pokmas dan terbatasnya kegiatan ketiga jenis pokmas tersebut.

Rendahnya pengetahuan tentang pokmas Coremap berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan ketiga jenis pokmas di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Persentase partisipasi masyarakat lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase pengetahuan tentang pokmas. Persentase partisipasi tertinggi terdapat pada pembentukan pokmas (31,6 persen) dan terendah pada kegiatan pokmas pengawasan (17,6 persen).

Keadaan ini dapat dimengerti karena pembentukan pokmas merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh Coremap, karena itu sebagian kecil anggota masyarakat cukup antusias untuk hadir dalam acara tersebut. Sebaliknya, kegiatan pokmas pengawasan hanya melibatkan anggota yang jumlahnya sangat

terbatas, hanya sebanyak 9 anggota (termasuk anggota dan bendahara). Namun keterlibatan yang dipahami masyarakat adalah keterlibatan aktif dalam kegiatan pokmas pengawasan, sedangkan keterlibatan pasif yang dilakukan oleh masing-masing anggota masyarakat untuk menjaga dan melindungi laut dari kegiatan ilegal belum dipahami sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan kegiatan LPSTK, LKM dan pokmas (termasuk pokmas jender, pokmas pengawas/konservasi) juga berkaitan dengan rendahnya dukungan dari pengelola Coremap di ketiga lokasi kajian. Keadaan ini digambarkan dari hanya sekitar sepertiga responden yang mengetahui kegiatan motivator desa (MD) dan fasilitator masyarakat (CF) serta hanya sebagian kecil dari mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan MD dan CF.

Terbatasnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan MD dan CF dikarenakan beberapa hal. Pertama, kegiatan MD (kecuali satu MD di Desa Waha) dan CF sangat terbatas, termasuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pembimbingan dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan UEP dan pembangunan sarpras fisik desa, serta pengembangan DPL dan pengawasan laut. Kedua, beberapa pengurus, terutama CF tidak tinggal di desa, sehingga dapat mengurangi frekuensi kegiatan di lokasi, bahkan seorang CF dari Kelurahan Wandoka baru mengunjungi lokasi sebanyak 3 kali selama hampir setahun masa kerjanya. Ketiga, kapasitas sebagian besar MD dan CF masih terbatas, bahkan beberapa MD dan CF di Desa Mola Selatan dan Kelurahan Wandoka belum mengetahui tentang terumbu karang, tugas dan kewajibannya secara lebih terperinci sebagai MD atau CF.

Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Coremap

Hasil BME menginformasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Coremap masih terbatas. Hanya sebagian kecil dari responden yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) dari *village grant* Coremap di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha. Keadaan ini berkaitan erat dengan masih terbatasnya kegiatan pembangunan yang dilakukan, yaitu pembangunan sarana ibadah di Kelurahan Wandoka, pembuatan jalan nelayan dan pagar pemandian umum di Kelurahan Wandoka dan jembatan perintis di Desa Mola Selatan (khususnya Nelayan Bakti), dan pembangunan sarana air bersih di Desa Waha, tong sampah dan MCK di Desa Mola Selatan. Selain itu, pembangunan sarpras, sebagian menggunakan tenaga upahan dengan keterampilan tertentu, sehingga jumlah yang terlibat juga sangat terbatas.

Partisipasi masyarakat bervariasi menurut jenis pembangunan dan desa/kelurahan. Kurang seperempat dari total responden berpartisipasi dalam pembangunan sarana kegiatan Coremap, seperti pondok informasi dan pondok pengawasan. Partisipasi tertinggi terdapat di Desa Waha dimana hampir separoh responden berpartisipasi, dan sebaliknya persentase terendah, hanya seperdelapan dari total responden di Desa Mola Selatan. Partisipasi dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan juga cukup rendah, sekitar seperempat dari total responden.

Manfaat Sosial dan Ekonomi Coremap

Coremap bertujuan melestarikan terumbu karang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang pertama berkaitan erat dengan perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya.

Sedangkan tujuan ke dua berhubungan erat dengan pekerjaan dan pendapatan serta kehidupan sosial masyarakat.

Hasil BME tentang perilaku masyarakat dalam pengambilan karang dan penggunaan bahan/alat yang ilegal menginformasikan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, khususnya nelayan di ketiga lokasi. Keadaan ini diindikasikan dari penurunan secara signifikan penggunaan bom dan bius atau tuba di semua lokasi.

Perubahan perilaku yang positif ini memberikan dampak yang cukup menggembirakan masyarakat, terutama nelayan. Hal ini terutama dirasakan nelayan Desa Waha, digambarkan dari membaiknya kondisi terumbu karang di kawasan perairan kedua lokasi ini. Keadaan ini berimplikasi pada semakin banyaknya volume ikan di kawasan karang. Beberapa narasumber mengungkapkan ikan-ikan semakin banyak ditemui di pinggir pantai dalam tahun terakhir ini. Kecenderungan peningkatan jumlah ikan tersebut tentu saja akan berdampak positif terhadap hasil tangkap nelayan kedepan.

Sedangkan hasil BME II tentang terbatasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Coremap berimplikasi pada manfaat sosial dan ekonomi Coremap yang masih kurang dirasakan oleh masyarakat di ke tiga lokasi. Terbatasnya manfaat sosial bersumber dari terbatasnya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) fisik desa melalui *village grant*, sedangkan terbatasnya manfaat ekonomi dari kegiatan atau usaha ekonomi produktif (UEP) melalui dana bergulir atau *seed fund*.

Sebagian besar masyarakat di ketiga lokasi mengungkapkan manfaat pembangunan sarpras fisik masih terbatas dan bervariasi antar desa sesuai dengan kebutuhan. Kurang dari separoh responden menyatakan manfaat pembangunan sarana ibadah, air bersih dan sanitasi lingkungan. Responden yang merasakan manfaat pembangunan infrastruktur (jalan setapak dan jembatan

perintis), jumlahnya jauh lebih kecil, kurang dari seperlima dari total responden. Sebagai contoh, jalan setapak (yang relatif pendek) menghubungkan jalan raya ke pondok informasi di Kelurahan Wandoka, hanya dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang dekat dengan jalan tersebut, sedangkan masyarakat lainnya menggunakan akses jalan yang lain. Kondisi yang serupa terjadi pada jembatan perintis yang dibangun di Desa Mola Selatan, khususnya Nelayan Bakti. Jembatan ini menghubungkan beberapa rumah yang letaknya di laut dengan jalan permukiman penduduk. Karena itu, hanya warga di sekitar jembatan tersebut yang memanfaatkan sarpras ini.

Manfaat pembangunan sarana kegiatan Coremap, seperti pondok informasi, juga masih rendah. Pondok informasi di Kelurahan Wandoka dan Desa Mola Selatan kurang bermanfaat, karena kurangnya kegiatan dan minimnya materi informasi di pondok tersebut. Selain itu, lokasi pondok informasi di Kelurahan Wandoka letaknya kurang strategis dan agak terisolasi dengan permukiman penduduk.

Berbeda dengan ke dua desa/kelurahan ini, pondok informasi di Desa Waha lebih bermanfaat, tidak hanya untuk kegiatan Coremap melainkan juga untuk kegiatan lain, seperti tempat berkumpul, bermain kartu dan menonton televisi sekelompok masyarakat, terutama pemuda-pemuda di desa ini. Pondok ini juga digunakan oleh para pejabat dari Kabupaten Wakatobi untuk mensosialisasikan kegiatan pemda dan kegiatan sosial lainnya, seperti berkumpul dan mendengarkan aspirasi sebagian anggota masyarakat dan menyalurkan hobi (berenang dan mancing).

Seperti manfaat sosial, manfaat ekonomi Coremap bagi masyarakat juga masih terbatas, karena terbatasnya anggota masyarakat, khususnya anggota kelompok masyarakat (pokmas) dan kelompok jender yang mendapat dana bergulir untuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh

pokmas dan kelompok jender sebagian kecil telah berkontribusi dalam pendapatan rumah tangganya, tetapi kebanyakan belum menghasilkan karena kecilnya dana, usaha merugi, gagal dan alasan tertentu.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa Coremap belum mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat masih bersumber dari kegiatan ekonomi non Coremap. Rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1,36 juta per bulan. Pendapatan bervariasi antar lokasi, tertinggi berasal dari rumah tangga di Desa Waha, yaitu sebanyak dua kali lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata rumah tangga di Kelurahan Wandoka, dan lebih dari tiga kali lipat dari rumah tangga di Desa Mola Selatan.

Distribusi pendapatan rumah tangga bervariasi menurut kelompok pendapatan dan desa. Lebih dari separoh rumah tangga berpendapatan kurang dari sejuta rupiah per bulan. Hampir tiga per empat dari total responden termasuk dalam kelompok berpendapatan antara Rp.500 ribu – 999 ribu per bulan, sebaliknya hanya sekitar 6 persen berpendapatan lebih dari Rp 3,5 juta per bulan. Distribusi rumah tangga berpendapatan paling rendah kurang dari Rp 500 ribu bervariasi antar desa. Persentase tertinggi berasal dari Desa Mola Selatan, disusul oleh Kelurahan Wandoka. Sedangkan di Desa Waha semua rumah tangga responden berpendapatan di atas Rp. 500 ribu per bulan.

Hasil BME II menginformasikan pendapatan per kapita sebesar Rp. 283 ribu per bulan. Pendapatan per kapita ini jumlahnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Rp. 274 ribu per bulan. Sebaliknya, pendapatan per kapita di ke tiga lokasi ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan menurut indikator World Bank yaitu 2 dollar per hari atau Rp 540 ribu per bulan.

Hasil kajian menggambarkan jumlah rumah tangga miskin yang terdapat di lokasi penelitian cukup tinggi, lebih dari seperempat dari jumlah rumah tangga terpilih. Persentase rumah tangga miskin tertinggi terdapat di Desa Mola Selatan, hampir separoh dari rumah tangga, diikuti oleh rumah tangga di Kelurahan Wandoka, sekitar seperempat dari total responden.

Pendapatan rumah tangga dari kenelayanan lebih rendah daripada pendapatan secara umum. Pendapatan tertinggi diperoleh pada musim tenang, yaitu sebesar Rp. 1,1 juta per bulan, dan sebaliknya, pendapatan terendah pada musim gelombang kuat, sebesar Rp. 602 ribu per bulan. Pendapatan tersebut hanya separoh dari pendapatan pada saat musim tenang dan 0,73 kali pendapatan per bulan pada musim pancaroba. Lebih dari separoh rumah tangga nelayan mengelompok pada rumah tangga berpendapatan terendah yaitu kurang dari Rp. 500 ribu per bulan. Persentase tertinggi terdapat pada rumah tangga di Kelurahan Wandoka, hampir separoh dari rumah tangga, diikuti oleh rumah tangga di Desa Mola Selatan, dan rumah tangga di Desa Waha.

Rendahnya pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan berkaitan erat dengan hasil tangkap yang tidak mengalami peningkatan kecuali di Desa Waha. Sebagian besar responden mengaku hasil tangkapan tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah adanya Coremap. Hanya sebagian kecil yang menginformasikan adanya kenaikan hasil tangkap, utamanya sebagai dampak kegiatan patroli laut dan keberadaan Daerah Perlindungan Laut (DPL).

Berbeda dengan pendapatan rumah tangga nelayan, rata-rata pendapatan rumah tangga anggota pokmas atau kelompok jender penerima UEP lebih besar yaitu Rp. 1,5 juta per bulan, lebih tinggi 13 persen dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak tergabung dalam pokmas. Distribusi tertinggi berada pada kelompok berpendapatan antara Rp. 1 juta - Rp.1, 499 juta per

bulan. Sedangkan distribusi tertinggi rumah tangga non pokmas yang tidak menerima UEP berada pada kelompok berpendapatan lebih rendah, yaitu RP. 500 ribu - Rp. 999 ribu per bulan.

Namun kondisi ini belum mengindikasikan keberhasilan Coremap dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga anggota pokmas penerima dana UEP. Hal ini dikarenakan anggota pokmas penerima dana UEP kebanyakan adalah anggota masyarakat yang telah mempunyai usaha dan tokoh-tokoh masyarakat dengan kondisi ekonomi yang relatif lebih baik daripada kondisi rumah tangga non pokmas. Di samping itu, pendapatan rumah tangga anggota pokmas penerima dana UEP ini merupakan total dari pendapatan rumah tangga, baik yang bersumber dari dana UEP maupun dana lainnya. Dengan demikian tidak dapat diklaim sebagai hasil dana UEP atau *seed fund* Coremap.

Hasil BME II ini menggambarkan bahwa kegiatan Coremap di Desa Mola Selatan, Kelurahan Wandoka dan Desa Waha masih terbatas dan belum memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan sesuai dengan indikator keberhasilan program. Keadaan ini berkaitan erat dengan masih terbatasnya kegiatan sosialisasi, pembangunan sarpras fisik desa dan usaha ekonomi produktif. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya partisipasi masyarakat dan manfaat sosial dan ekonomi Coremap bagi masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan Coremap di ke tiga lokasi telah memberikan dampak yang positif terhadap pentingnya pelestarian terumbu karang, diindikasikan dari berkurangnya kegiatan penggunaan bahan/alat illegal secara signifikan di lokasi-lokasi tersebut.

4.2. REKOMENDASI

Hasil BME II merupakan pembelajaran yang sangat penting untuk memperbaiki kegiatan Coremap kedepan. Perbaikan sangat

diperlukan agar program ini dapat mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan dalam indikator. Pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut:

Peningkatan Pengetahuan dan Kepedulian terhadap Pelestarian Terumbu Karang

- Pentingnya menjaga perilaku nelayan yang positif, tidak lagi menggunakan bahan/alat ilegal, seperti bom dan bius dalam menangkap ikan, khususnya ikan karang hidup. Hal ini sangat penting karena ada kecenderungan untuk mengulangi perilaku yang negatif, menangkap ikan dengan bius agar bisa memperoleh ikan dengan mudah dan dalam waktu yang pendek
- Pentingnya meningkatkan fungsi pondok informasi sebagai tempat yang menjadi sumber informasi kegiatan terumbu karang terutama di Desa Mola Selatan dan Kelurahan Wandoka. Cara yang dapat dilakukan adalah: 1) menambah bahan-bahan atau materi informasi tentang Coremap yang dapat diminta dari berbagai sumber, seperti semua komponen Coremap Kabupaten Wakatobi (PA , CBM, MCS dan CRITC) dan Coremap pusat, termasuk dari CRITC dan Bidang Edukasi, serta *stakeholders* lain, seperti Wallacea, WWF, dan Taman Nasional, dan 2) melakukan kegiatan-kegiatan Coremap secara reguler, seperti sosialisasi, usaha ekonomi produktif (UEP) dan pembangunan sarpras fisik desa di pondok informasi
- Pentingnya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan di tingkat desa, termasuk pengawasan terumbu karang dan pengembangan DPL
- Pentingnya meningkatkan kinerja pokmaswas di ke tiga lokasi kajian, terutama pokmaswas Desa Mola Selatan dan

Kelurahan Wandoka. Peningkatan kinerja pokmaswas ini diperlukan untuk memelihara perilaku nelayan yang positif, tidak menggunakan bahan ilegal dan mengambil pasir dan batu karang di kawasan karang yang dilarang, terutama di Desa Mola Selatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Manfaat Sosial Coremap

- Pentingnya meningkatkan sosialisasi program Coremap, termasuk tujuan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, proses dan mekanisme pelaksanaannya kepada anggota pokmas/pokmaswas dan masyarakat di semua lokasi. Kegiatan ini penting tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman pokmas/pokmaswas dan masyarakat, melainkan juga mengurangi kecurigaan yang dapat menimbulkan gesekan atau berpotensi konflik antar *stakeholders* tersebut.
- Perlunya meningkatkan sosialisasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) fisik yang bersumber dari dana *village grant* Coremap. Sosialisasi ini diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan anggota masyarakat akan bangunan sarpras fisik dan manfaat bangunan tersebut bagi kehidupan sosial masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan jembatan perintis di Desa Mola Selatan yang sekarang menjadi Desa Nelayan Bakti, dan pagar pemandian umum di Kelurahan Wandoka. Kebanyakan anggota masyarakat tidak mengetahui pembangunan sarpras tersebut karena minimnya sosialisasi
- Pentingnya meningkatkan peran LPSTK, MD dan CF dalam pelaksanaan Coremap di ke tiga lokasi, terutama Kelurahan Wandoka dan Desa Mola Selatan
- Pentingnya meningkatkan kemampuan LPSTK, LKM, MD dan CF di semua lokasi, baik yang berkaitan dengan pengetahuan

tentang terumbu karang dan pengelolaan ekosistem ini maupun yang berkaitan dengan manajemen kegiatan Coremap. Kemampuan ini sangat diperlukan agar pengelola Coremap tersebut dapat mensosialisasikan dan melaksanakan kegiatan Coremap sesuai dengan ketentuan dan capaian yang diharapkan

- Pentingnya komunikasi, penjelasan dan transparansi mengenai kegiatan-kegiatan Coremap (termasuk sistem yang berlaku, pendanaan dan proses pelaksanaan) untuk mengurangi berbagai kecurigaan anggota pokmas dan masyarakat terhadap pengurus Coremap di tingkat lokasi dan kabupaten.

Peningkatan Capaian Ekonomi

- Perlunya meningkatkan paket kegiatan ekonomi yang diimplementasikan untuk pokmas. Upaya peningkatan jumlah paket ekonomi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan jumlah anggota pokmas yang terlibat dalam kegiatan UEP/MPA dan mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut
- Pentingnya sosialisasi pengembalian dana bergulir yang diberikan pada anggota pokmas agar dana tersebut dapat digulirkan atau diberikan pada anggota pokmas yang belum menerima. Kegiatan ini diperlukan di ke tiga lokasi, terutama Desa Waha dan Kelurahan Wandoka, karena adanya informasi dari beberapa 'oknum' di masyarakat yang menyatakan anggota pokmas tidak perlu mengembalikan dana yang telah diberikan
- Pentingnya bimbingan teknis secara reguler bagi anggota pokmas dalam melakukan kegiatan ekonomi

- Perlunya memperhatikan jenis kegiatan ekonomi sesuai dengan rencana pengelolaan terumbu karang (RPTK) yang telah disepakati masyarakat pada awal kegiatan Coremap. Kegiatan yang diberikan kadangkala berbeda dengan yang diusulkan, tetapi kegiatan ekonomi tersebut tetap dilakukan daripada tidak mendapat kegiatan sama sekali
- Pentingnya monitoring kegiatan ekonomi (UEP/MPA) oleh komponen CBM. Monitoring ini diperlukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Monitoring diharapkan dapat memperbaiki kegiatan, sebelum semuanya terlambat atau gagal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen I. 2002. Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32, 665-683.
- Bappeda Kabupaten Wakatobi. 2006. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi 2006-2011*. Wanci: Bappeda Kabupaten Wakatobi.
- BPS Kabupaten Wakatobi. 2006. *Wakatobi Dalam Angka 2005/2006*. Wanci: Kerjasama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi
- BPS Kabupaten Wakatobi. 2006. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wakatobi 2003-2005*. Wanci: Kerjasama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi
- BPS Kabupaten Wakatobi. 2007. *Kabupaten Wakatobi dalam Angka 2006/2007*. Wanci: BPS Kabupaten Wakatobi.
- BPS. 2007. *Kecamatan Wangi-Wangi dalam Angka Tahun 2006/2007*. Wanci: BPS Kabupaten Wakatobi.
- BPS. 2007. *Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dalam Angka Tahun 2006/2007*. Wanci: BPS Kabupaten Wakatobi.
- BPS. 2008. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2007. *Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006, Buku II : Kabupaten*. Jakarta: BPS.

- CRITC – LIPI. 2007. *Survei Ekologi Terumbu Karang di Kabupaten Wakatobi*. Jakarta: CRITC – LIPI.
- Haapkylä, J.; A.S. Seymour, J. Trebilco and D. Smith. 2007. Coral disease prevalence and coral health in the Wakatobi Marine Park, south-east Sulawesi, Indonesia. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom* (2007) 87, 403–414.
- Hidayati, Deny., Ngadi., Cahyadi, Rusli. 2008. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II: Hasil BME di Kabupaten Wakatobi*. Jakarta: CRITC – LIPI.
- Hidayati, Deny., Ngadi., dan Daliyo. 2007. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi Coremap II: Kasus Kabupaten Wakatobi*. Jakarta: CRITC – LIPI.
- Hidayati, Deny. 2003. Coral reef rehabilitation and management program in Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Surfing Reef Symposium*, Raglan, New Zealand, June 22-25, 2003. p303-319.
- Hidayati, Deny., dan, Laksmi, Rachmawati. 2002. *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia: Studi Kasus Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Buton*. Jakarta: Coremap – LIPI.
- http://www.kendarikota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=130 KDA - Keuangan dan Harga-Harga.
- Stacey, Natasha. 2007. *Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in the Australian Fishing Zone*. Asia-Pacific Environment Monograph 2. ANU E Press



